

**PENERAPAN SISTEM MUKHABARAH DALAM KEGIATAN
PERTANIAN DI KELURAHAN PALINGKAU LAMA
KECAMATAN KAPUAS MURUNG KABUPATEN KAPUAS**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**



Oleh:

MASTINA
NIM. 1402120311

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1440 H/ 2019 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PENERAPAN SISTEM MUKHABARAH DALAM
KEGIATAN PERTANIAN DI KELURAHAN
PALINGKAU LAMA KECAMATAN KAPUAS
MURUNG KABUPATEN KAPUAS

NAMA : MASTINA

NIM : 1402120311

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2019

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Sadiqni, M.H
NIP. 196501011998031003

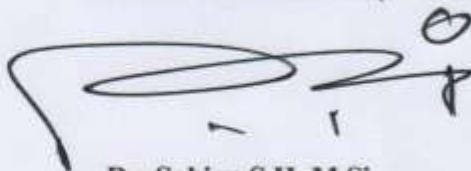
Pembimbing II



Nur Fuadi Rahman, M.Pd
NIK. 199112032018090222

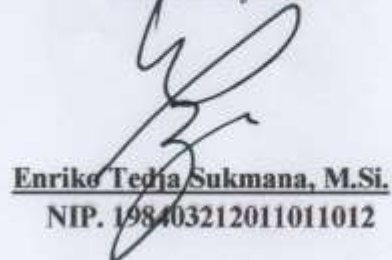
Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian S.H, M.Si
NIP. 196311091992031004

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah



Enrike Tedja Sukmana, M.Si.
NIP. 198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Mastina

Palangka Raya, Oktober 2019

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mastina
NIM : 1402120311
Judul : **PENERAPAN SISTEM MUKHABARAH DALAM
KEGIATAN PERTANIAN DI KELURAHAN PALINGKAU
LAMA KECAMATAN KAPUAS MURUNG KABUPATEN
KAPUAS**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

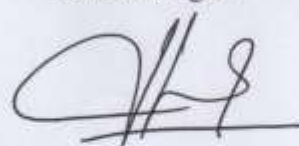
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Dr. Sadiani, M.H
NIP. 196501011998031003

Pembimbing II



Nur Fuadi Rahman, M.Pd
NIK. 199112032018090222

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PENERAPAN SISTEM MUKHABARAH DALAM KEGIATAN PERTANIAN DI KELURAHAN PALINGKAU LAMA KECAMATAN KAPUAS MURUNG KABUPATEN KAPUAS** oleh Mastina NIM: 1402120311 telah dimunaqasyahkan Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Oktober 2019 M

Palangka Raya, 24 Oktober 2019

Tim Penguji

1. **SOFYAN HAKIM, M.M**

Ketua Sidang/ Penguji

(.....)

2. **ALI SADIKIN, M.SI**

Penguji I

(.....)

3. **DR. SADIANI, M.H**

Penguji II

(.....)

4. **NUR FUADI RAHMAN, M.Pd**

Sekretaris/ Penguji

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

(.....)

DR. DRS. SABIAN UTSMAN, S.H, M.SI

NIP. 19631109 199203 1 004

PENERAPAN SISTEM MUKHABARAH DALAM KEGIATAN PERTANIAN DI KELURAHAN PALINGKAU LAMA KECAMATAN KAPUAS MURUNG KABUPATEN KAPUAS

ABSTRAK

Masyarakat Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian. Karena tidak semua petani yang memiliki lahan sendiri untuk digarap, jadi sebagian petani menggarap lahan pertanian milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam muamalah, kerja sama bagi hasil pertanian salah satunya disebut *mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari si petani penggarap.

Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana latar belakang terjadinya kerja sama *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. (2) Bagaimana praktik *mukhabarah* pada pertanian padi di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. (3) Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem *mukhabarah* di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, subjeknya adalah pemilik tanah dan petani penggarap di kelurahan Palingkau Lama, objeknya adalah praktik *mukhabarah* hasil pertanian di kalangan masyarakat petani di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Latar belakang terjadinya kerja sama *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap di kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yaitu tidak semua petani di kelurahan Palingkau Lama memiliki lahan pertanian sendiri untuk digarap, tetapi memiliki kemampuan untuk bertani, dan ada juga pemilik tanah yang tidak memiliki kemampuan ataupun waktu sehingga tidak dapat mengelola lahannya sendiri, kondisi ini yang mendorong Pemilik Tanah dan Petani Penggarap melakukan kerja sama. (2) Praktik *mukhabarah* pada pertanian padi di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yaitu setelah melakukan akad maka kewajiban pemilik tanah adalah menyerahkan lahannya kepada petani penggarap, sedangkan kewajiban petani penggarap adalah mengelola lahan tersebut. Kemudian ketika sudah panen maka kedua belah pihak berhak menerima hasil panen dari sawah tersebut sesuai akad yang dilakukan. (3) Tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem *mukhabarah* di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yaitu Akad *mukhabarah* yang dilakukan di kelurahan Palingkau Lama dapat dikategorikan kerja sama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu saling rela dan menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.

Kata Kunci : Penerapan, *Mukhabarah* dan Pertanian.

THE IMPLEMENTATION OF *MUKHABARAH* SYSTEM ON AGRICULTURAL ACTIVITIES IN PALINGKAU LAMA URBAN VILLAGE, KAPUAS MURUNG SUB-DISTRICT, KAPUAS DISTRICT

ABSTRACT

The society of Palingkau Lama Urban Village (Kelurahan Palingkau Lama), Kapuas Murung Sub-District (Kecamatan Kapuas Murung), Kapuas District (Kabupaten Kapuas) is the society which the majority of the people's income rely on agricultural products. Since not all of the farmers have their own fields to be cultivated, some of the farmers cultivate other people's agricultural field to fulfill their economic needs. In *muamalah*, the activity of agricultural products profit sharing cooperation is called *mukhabarah*. *Mukhabarah* is a form of cooperation between the field owners and the farmers with an agreement that the result of the products will be divided between the two parties according to the mutual agreement, while the cost and the seeds are all provided by the farmers.

The research is focused on three problem formulations: (1) What is the background of the occurrence of cooperation between the field owners and the farmers in Palingkau Lama Urban Village, Kapuas Murung Sub-District, Kapuas District?; (2) How does the *mukhabarah* practice on the rice fields in Palingkau Lama Urban Village, Kapuas Murung Sub-District, Kapuas District occur?; (3) How does the review of Islamic Economy in the implementation of profit sharing which is carried out daily with the *mukhabarah* system in Palingkau Lama Urban Village, Kapuas Murung Sub-District, Kapuas District occur?

This research uses qualitative descriptive method, the subject is the field owners and the farmers in Palingkau Lama Urban Village, Kapuas Murung Sub-District, Kapuas District, the object is the *mukhabarah* practice of agricultural products in the farmers' society in Palingkau Lama Urban Village, Kapuas Murung Sub-District, Kapuas District. The data collecting techniques are observation, interview, and documentation.

The results of the research are: (1) The background of the occurrence of cooperation between the field owners and the farmers in Palingkau Lama Urban Village, Kapuas Murung Sub-District, Kapuas District, which is found that not all of the farmers in Palingkau Lama Urban Village have their own fields to be cultivated, but still have the ability to farm, and there are owners of the fields who do not have the ability or time to cultivate their own fields, this situation prompts the field owners and the farmers to cooperate with each other; (2) The *mukhabarah* practice on the rice field in Palingkau Lama Urban Village, Kapuas Murung Sub-District, Kapuas District is after the *akador* contract is done, the responsibility of the field owners are to give their fields to the farmers, while the responsibility of the farmers are to manage the fields. After the fields are harvested, both parties have the rights to accept the agricultural products of the fields in accordance to the contract that has signed and agreed before; (3) The review of Islamic Economy in the implementation of profit sharing which is carried out daily with *mukhabarah* system in Palingkau Lama Urban Village, Kapuas Murung Sub-District, Kapuas District is that the *akador* the contract done in the Palingkau Lama Urban Village could be categorized as a legal cooperation since it embodies the *muamalah* principle of mutual willingness and becomes the custom which does not contradict the *Quran* and *Hadith*.

Keywords : Agricultural, Implementation, *Mukhabarah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Sistem Mukhabarah Dalam Kegiatan Pertanian Di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas”** dengan lancar. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian S.H, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.Si selaku ketua jurusan Ekonomi Islam di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Drs. Surya Sukti, MA selaku dosen penasihat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.

5. Bapak Dr. Sadiani, M.H. sebagai dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak Nur Fuadi Rahman, M.Pd sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian.
8. Ayah dan Ibu penulis yang telah memberikan dukungan materil dan selalu mendoakan keberhasilan dan keselamatan penulis selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, Oktober 2019
Penulis,

MASTINA
NIM. 1402120311

PERNYATAAN ORISINILITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PENERAPAN SISTEM MUKHABARAH DALAM KEGIATAN PERTANIAN DI KELURAHAN PALINGKAU LAMA KECAMATAN KAPUAS MURUNG KABUPATEN KAPUAS"** adalah benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung risiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



MASTINA

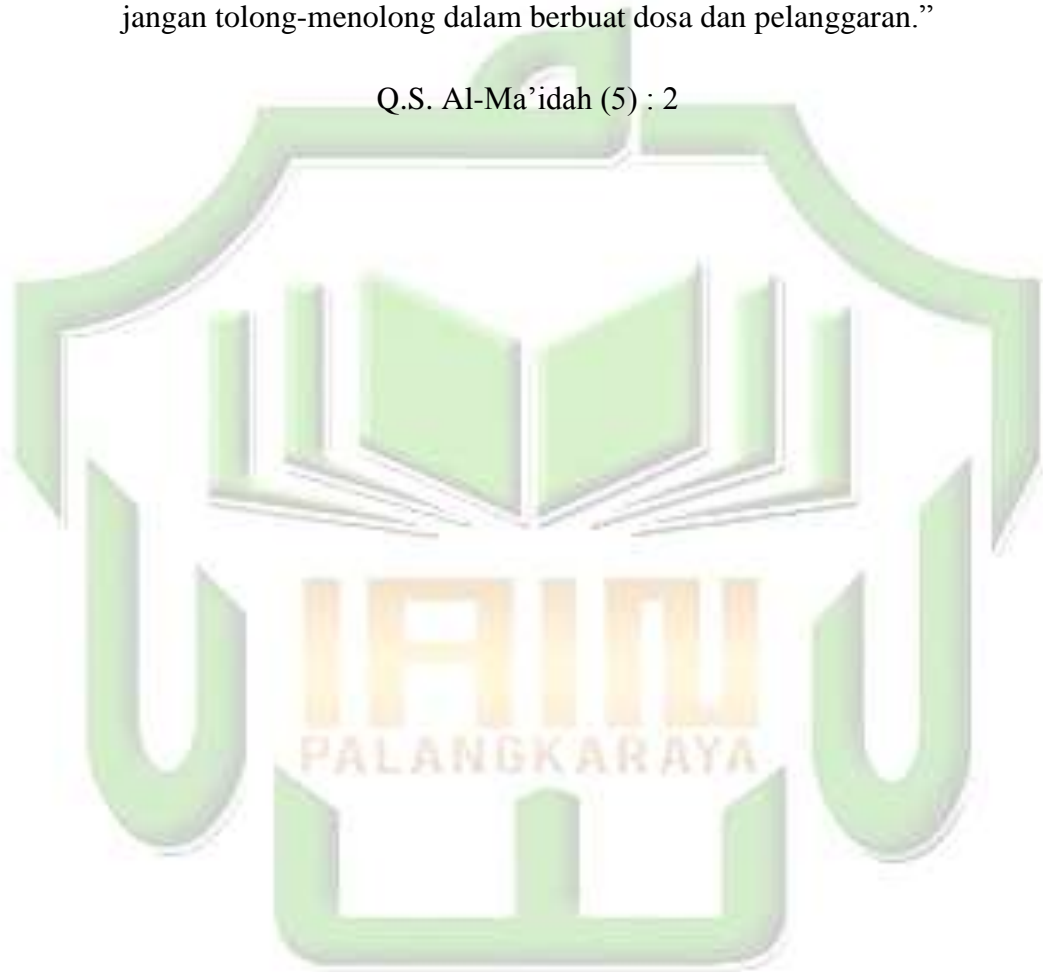
NIM. 1402120311

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Q.S. Al-Ma'idah (5) : 2



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINILITAS	ix
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB II PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penulisan	7
E. Batasan Masalah	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	14
1. Teori <i>Mukhabarah</i>	14

2. Teori Ikhlas	27
3. Teori Keadilan dalam Islam	29
4. Teori Perjanjian	36
C. Konsep Penelitian	38
1. Pengertian Peneraan	38
2. Pengertian <i>Mukhabarah</i>	39
3. Pengertian Ikhlas	40
4. Pengertian Keadilan	41
5. Pengertian Perjanjian	43
D. Kerangka Pikir	44
E. Bagan Penelitian	45
F. Pertanyaan Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Waktu dan Tempat Penelitian	48
B. Jenis Pendekatan Penelitian	48
C. Objek dan Subjek Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	49
1. Observasi	49
2. Wawancara	50
3. Dokumentasi	50
E. Pengabsahan Data	51
F. Analisis Data	52
1. <i>Data Reduction</i> (Reduksi Data)	53
2. <i>Data Display</i> (Penyajian Data)	53
3. <i>Conclusion Drawing/ Verification</i> (Menarik Kesimpulan/ Verifikasi)	53
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Kota Kapuas	54

2. Palingkau Lama	60
B. Hasil Penelitian	61
1. Latar Belakang Terjadinya Kerja Sama <i>Mukhabarah</i> Antara Pemilik Tanah Dengan Petani Penggarap Di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas	61
2. Praktik <i>mukhabarah</i> pada pertanian padi di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas	71
C. Analisis Hasil Penelitian	89
1. Latar Belakang Terjadinya Kerja Sama <i>Mukhabarah</i> Antara Pemilik Tanah dengan Petani Penggarap Di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas	90
2. Praktik <i>Mukhabarah</i> Pada Pertanian Padi Di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas	97
3. Tinjauan Ekonomi Islam dalam Penerapan Bagi Hasil Yang Dilakukan Sehari-Hari dengan Sistem <i>Mukhabarah</i> Di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas	109
BAB V PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN	130

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nama, Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Per-Kecamatan.....	57
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berhubungan dengan pembangunan di Indonesia yang masih menitik beratkan pada sektor pertanian yang menjadi dasar bagi sektor-sektor pembangunan lainnya. Pengertian pembangunan dari sektor pertanian adalah seluruh upaya memanfaatkan kekayaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan, sumber daya manusia, modal, serta ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan produksi pertanian dan bahan baku primer bagi industri-industri yang menopang. Dari pembangunan sektor pertanian inilah diharapkan agar tujuan pembangunan nasional dapat terwujud yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat Indonesia secara adil dan makmur, merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berbicara tentang sektor pertanian tidak bisa dilepaskan dari keberadaan tanah sebagai salah satu sumber daya alam yang utama. Tanah dalam pengertian umum adalah tempat untuk berpijak dan tempat untuk hidup. Terhadap tanah terdapat hak dan kewajiban setiap orang dan badan hukum untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang baik bagi dirinya sendiri, keluarga, dengan mengerjakan dan mengusahakannya sendiri secara aktif dan menoleh pemerasan. Hal ini tertera dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria Indonesia, pasal 9 ayat 1, disebutkan:

“Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.”

“Setiap orang dan badan hukum mempunyai hak dan suatu tanah pertanian pada azasnya diwajibkan untuk mengerjakannya sendiri atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah tindakan pemerasan.”

Tanah wilayah perkotaan yang dulunya merupakan wilayah yang subur untuk pertanian, kini dipadati dengan pembangunan pemukiman baru yang berdampak pada menurunnya produksi dari sektor pertanian. Sementara itu, dari wilayah pedesaan semakin banyak wilayah pertanian yang dikuasai oleh pemilik modal yang besar dan sebagian lagi ditinggalkan oleh pemiliknya. Tidak sedikit petani di wilayah pedesaan yang meninggalkan lahan pertanian didesanya karena didesak oleh keadaan ekonomi yang semakin terpuruk. Akibat meningkatnya biaya hidup, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Pada akhirnya pemilik tanah menguasai hampir sebagian besar lahan pertanian. Agar tidak terjadi ketimpangan dan untuk menghindarkan adanya lahan menganggur dibutuhkan adanya kerjasama antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Hal tersebut bisa berupa asas tolong menolong. Di dalam Islam tolong menolong sangat dianjurkan, karena manusia itu adalah makhluk sosial dan tidak terlepas dari sesamanya.

Pertanian merupakan salah satu bidang usaha yang sangat penting, *Imam Al-Qurtubi* memandang bahwa usaha pertanian adalah *fardu kifayah*. Di mana pemerintah wajib mengarahkan manusia ke arah pertanian tersebut dan segala hal yang berkaitan dengannya dalam bentuk menanam pohon. Bidang pertanian tersebut haruslah mendapat perhatian lebih dari masyarakat, khususnya pemerintah, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal makanan. Pertanian pun memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Islam pun telah mengaturnya sesuai dengan syariat. Dalam suatu masyarakat, terdapat sebagian mereka yang mempunyai lahan pertanian yang baik untuk ditanami agar menghasilkan. Namun tidak memiliki kemampuan untuk bertani, dan ada juga yang memiliki lahan dan juga mempunyai kemampuan untuk menanamnya tetapi kekurangan modal, dan ada juga yang tidak memiliki sesuatupun, kecuali memiliki tenaga dan kemampuan dalam bercocok tanam.

Bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan petani penggarap telah diatur sedemikian rupa di Indonesia, baik dalam hukum Islam maupun dalam undang-undang. Dalam hukum Islam telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh yang merupakan hasil ijtihad dari para ulama. Sistemnya dapat kita kenal dengan istilah *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah*, dan *mugharasah*. Itu merupakan akad-akad muamalah Islam dalam hal pemanfaatan tanah khususnya pertanian. Dalam Undang-undang pun telah diatur tentang bagi hasil tanah pertanian yang berlaku secara menyeluruh di wilayah Indonesia yaitu UU No. 2 tahun 1960. UU tersebut mengatur perjanjian bagi hasil

pemilik tanah dan petani penggarap dengan pembagian bagi hasil yang adil dengan menegaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan perjanjian.¹

Mukhabarah dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan. Persamaannya ialah antara *mukhabarah* dan *muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaannya ialah pada modal, bila modal dari pengelola, maka disebut *mukhabarah*, dan bila modal dikeluarkan dari pemilik tanah, maka disebut *muzara'ah*.²

Peneliti akan lebih fokus membahas tentang akad yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas dalam melakukan perjanjian atau perikatan yang berupa *mukhabarah* yaitu pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya untuk digarap oleh penggarap dan benihnya dari penggarap itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi sementara, bahwa masyarakat kelurahan Palingkau Lama yang mayoritas masyarakatnya mempunyai pekerjaan sebagai petani yaitu sekitar 70%.³ Dan kebanyakan memakai sistem *mukhabarah* dalam pelaksanaannya, karena ada sebagian petani yang tidak memiliki tanah sendiri untuk digarap dan ada pula yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya sendiri atau memiliki pekerjaan lain

¹ Erick Prasetyo Agus, *Produktivitas Kerja Petani Ditinjau Dari Sistem Muzara'ah*, diakses pada <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/14508/>, pada tanggal 04-07-2018, pukul 20.43 WIB.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, Hal. 155-156.

³ Profil Kelurahan Palingkau Lama.

sehingga tidak ada waktu untuk menggarap tanahnya sendiri. Maka dari situ terjadilah kerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap dalam melakukan akad bagi hasil dengan sistem *mukhabarah*, yang kemudian hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembagian hasil sistem *mukhabarah* yang terjadi di Palingkau Lama yaitu $\frac{1}{4}$ bagian untuk pemilik tanah dan $\frac{3}{4}$ bagian untuk petani penggarap. Karena pemilik tanah di sini hanya meminjamkan lahannya saja untuk digarap, sedangkan si petani yang menyediakan modal dari bibit, pupuk dan sebagainya.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berusaha mengetahui dan menganalisa penerapan akad *mukhabarah* dan penerapan bagi hasil yang dipraktekkan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul **“Penerapan Sistem Mukhabarah Dalam Praktik Perekonomian Di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas”**

⁴ Wawancara dengan bapak S (Pemilik Tanah) di Kelurahan Palingkau Lama, Sabtu, 14-07-2018.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang terjadinya kerja sama *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas?
2. Bagaimana praktik *mukhabarah* pada pertanian padi di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem *mukhabarah* di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana latar belakang terjadinya kerja sama *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seperti apa praktik *mukhabarah* pada pertanian padi di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem *mukhabarah* di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap adanya pelaksanaan kajian fiqih ekonomi dalam praktek mukhabarah pada masyarakat petani desa palingkau lama dalam pengelolaan bagi hasil pertanian.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi S1 di fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan mengkaji penerapan sistem mukhabarah pada masyarakat petani palingkau lama.

E. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, dalam penelitian ini penulis membatasinya pada ruang lingkup penerapan sistem *mukhabarah* yang dilakukan oleh para petani padi di kelurahan palingkau lama kecamatan kapuas murung kabupaten kapuas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hasil penelitian ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, merupakan bab pembukaan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori antara lain teori mukhabarah, teori iklas, dan teori keadilan dalam Islam, konsep penelitian terdiri dari penerapan, mukhabarah, keadilan, dan iklas. Selanjutnya kerangka pikir dan pertanyaan penelitian.
- BAB III** Metode Penelitian, terdiri dari waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.
- BAB IV** Hasil dan Analisis Penelitian, terdiri dari hasil dan analisis tentang latar belakang terjadinya kerja sama *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan penggarap tanah di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, praktik *mukhabarah* pada pertanian padi antara pemilik tanah dengan penggarap tanah di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap

penerapan bagi hasil dengan sistem *mukhabarah* di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema mengenai *mukhabarah* maupun sistem kerja sama lain dan hal yang terkait di dalamnya, berikut di antaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Ro'fatul Irohah, NIM. C02211011 tahun 2015, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul "Praktik Akad *Mukhabarah* Di Desa Bolo Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik (Kajian Tentang Realitas Hukum Islam)." Rumusan masalah pada penelitiannya adalah bagaimana realitas sosial tentang persepsi hasil dari masing-masing pelaku akad *mukhabarah* dan komitmen pelaku dalam pembagian hasil di Desa Bolo Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik. Kemudian, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap realitas sosial tentang persepsi para pelaku akad *mukhabarah* dan komitmen bagi hasil di desa Bolo kecamatan Ujungpangkah kabupaten Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode penelitian kualitatif, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), sumber data terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.

Penelitiannya menerangkan bahwa persepsi pelaku akad *mukhabarah* di desa Bolo kecamatan Ujung pangkah kabupaten Gresik yaitu para penggarap tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati di awal akad, hal tersebut bisa merusak akad yang telah disepakati, sehingga dapat merusak hukum Islam. Para petani penggarap telah mengemukakan bahwa ia tidak mau rugi dan tidak mau memberikan hasil panen tersebut kepada pemilik lahan maka hal ini tidak sah, karena salah satu pihak akan merasa terkianati dan hal itu termasuk curang. Akad kerjasama seperti itu melanggar akad *mukhabarah*, dan jelas dilarang dalam hukum Islam dan akad ini menjadi sah apabila apa yang sudah disepakati di awal akad itu bisa terealisasi dengan baik sebagaimana yang dikemukakan oleh kedua pelaku akad, bahwa hasil adalah apa yang keluar dari tanah atau lahan tersebut, kemudian dibagi di antara keduanya dengan dikurangi biaya-biaya operasional selama masa pengolahan lahan.⁵

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Mukhammad Sukron, NIM. 21411007 tahun 2016, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukhabarah* Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang". Rumusan masalah dalam penelitiannya adalah Bagaimana praktek kerjasama kemitraan dalam pertanian yang berupa bagi hasil *mukhabarah* di Desa Tlogorejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten

⁵ Ainun Ro'fatul Irohah, *Praktik Akad mukhabarah Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik (Kajian Tentang Realitas Hukum Islam)*, diakses pada <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/3441>, diunduh pada tanggal 26-07-2018, Pukul 10.55 WIB.

Magelang. Kemudian, Apakah praktek bagi hasil *mukhabarah* tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan *field research* (lapangan) dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi selain itu digunakan juga data dan dokumen untuk melengkapi hasil penelitiannya.

Penelitiannya menerangkan bahwa bagi hasil *mukhabarah* dilakukan oleh dua orang antara pemilik sawah dan petani penggarap. Akad yang dilakukan secara lisan yang berisi kesepakatan kedua belah pihak tentang penggarapan sawah dan pembagian hasilnya. Dalam kesepakatan tersebut, hasil panen dibagi rata antara pemilik sawah dan petani penggarap yaitu 50% : 50% atau dalam bahasa Jawa disebut *maro*, yang mana biaya penggarapan sawah mulai dari benih dan lain-lain ditanggung oleh petani penggarap. Di tinjau secara Hukum Islam, praktik bagi hasil *mukhabarah* di Desa Tlogorejo tersebut sudah memenuhi kriteria Hukum Islam. Akan tetapi apabila dilihat dari undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka praktik tersebut belum tepat.⁶

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Syarifah Nurul Faridah, NIM. 121310084 tahun 2017, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, dengan judul "Implementasi Akad *Mukhabarah* pada pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat

⁶ M. Sukron, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*, diakses pada http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/780/1/M.Sukron_21411007.pdf, diunduh pada tanggal 06-07-2018, Pukul 20.27.

Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah”. Rumusan masalah pada penelitiannya adalah Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad kerja sama pengelolaan perkebunan kopi yang berlaku di kalangan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kegiatan kerja sama pengelolaan perkebunan kopi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah ditinjau menurut konsep *mukhabarah*. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu dengan cara *field research* (Penelitian Lapangan) dan *Library Research* (Penelitian Kepustakaan). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen.

Penelitiannya menerangkan bahwa mekanisme pelaksanaan kerja sama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang merupakan sistem kerja sama dengan akad *bagi due tanoh* yang sangat mirip dengan konsep *mukhabarah* dalam Islam, hanya saja pada praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Ditinjau dari konsep Islam, ketidakseimbangan terjadi pada posisi kedudukan para pihak. Berdasarkan praktik yang dilakukan masyarakat, posisi pengelola menjadi lebih tinggi (*superior*) dibandingkan pihak pemilik lahan. Hal ini dilihat dari hak-hak yang diperoleh pengelola lahan dan keuntungannya yang lebih banyak dari pemilik lahan sendiri. Walau hal ini sudah biasa berlaku di tengah masyarakat, namun

dari segi hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan, karena terdapat ketidakadilan dan dapat menjurus hingga menzalimi salah satu pihak.⁷

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian saya yaitu tentang sistem bagi hasil *mukhabarah*, jenis penelitiannya pun sama yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti adalah terletak pada objek penelitiannya dan tempat penelitiannya pun berbeda, penelitian di atas lebih fokus pada hukum Islam sedangkan penelitian saya lebih fokus pada ekonomi Islam. Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan penelitian mengenai bagaimana praktik *mukhabarah* pada pertanian padi yang mereka lakukan, dan melakukan tinjauan ekonomi Islam untuk membandingkan praktik di dalam masyarakat dengan sistem *mukhabarah*.

B. Kajian Teori

1. Teori *Mukhabarah*

a. Definisi *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.⁸

⁷ Syarifah Nurul Faridah, *Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*, diakses pada <https://repository.ar-raniry.ac.id/2302/1/SKRIPSI%2520SYARIFAH%2520NURUL%2520FARIDAH.pdf>, diunduh pada tanggal 06-07-2018, Pukul 21.56 WIB.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, Hal. 117.

Mukhabarah dalam istilah kebiasaan orang Indonesia terutama pada pedesaan disebut dengan istilah “paroan sawah”. Dan masyarakat sering mempraktikkannya, karena terdapat manfaat yang besar, baik bagi pemilik tanah sawah maupun bagi petani penggarap. Pemilik tanah sawah apalagi luas ukurannya tidak mungkin mengelola sawah sendirian, maka dia membutuhkan petani penggarap untuk membantunya. Begitupun petani penggarap sangat terbantu, apalagi yang tidak mempunyai tanah sawah dapat mendapatkan mata pencaharian sesuai keahliannya untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan hidup sehari-harinya.⁹

b. Dasar Hukum Mukhabarah

Hukum *mukhabarah* itu di-*ikhtilaf*-kan oleh ulama. Ada yang memperbolehkan dan ada pula yang melarangnya, dengan alasan upahnya masih samar.¹⁰

Sabda Nabi SAW.:

مَنْ لَمْ يَدْرِ الْخَابِرَةَ فَلْيُؤَذِّ نَبَحْرًا مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. {رواه أبو داود}

Artinya: “Barang siapa yang tidak meninggalkan sistem mukhabarah, beritahukanlah serangan dari Allah dan Rasulnya.” (H.R. Abu Dawud)¹¹

⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016, Hal. 168.

¹⁰ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, Hal. 121.

¹¹ Lidwa Pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Abu Daud*, Hadits No - 2957.

Mayoritas ulama membolehkan akad bagi hasil tanaman, baik dalam bentuk *musaqah* dan *muzara'ah* secara terpisah (sendiri-sendiri) maupun bersamaan, berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi pernah mempekerjakan penduduk Khaibar untuk memelihara/ menanam tanaman dengan perjanjian bagi hasil sebanyak separuh dari hasil tanaman atau buahnya. Hal ini juga diikuti oleh para sahabatnya.¹²

Ulama Malikiyah, Hanabilah, Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah) dan Hanafiyah berpendapat *mukhabarah* hukumnya diperbolehkan. Pendapat tersebut juga telah dikemukakan oleh ulama generasi sebelumnya seperti sa'id bin al-Musayyab, Thawus, Abdurrahman bin al-Aswad, Musa bin Thalhah, al-Zuhri, Abdurrahman bin Abi Laila dan anaknya, dan Ibnu Abbas.

Adapun Syafi'iyah memperbolehkan apabila *muzara'ah* diikuti sertakan kepada *musaqah* dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya apabila terjadi kerja sama dalam pengelolaan kebun, kemudian ada tanah kosong atau tanah yang tidak ada pepohonan di dalamnya (*al-bayadh*), yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, maka dalam hal ini akad *muzara'ah* boleh dilakukan.

¹² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, ..., Hal. 121-122.

Dalil yang dijadikan argumen oleh mereka adalah dalil hadits, ijma' dan akal.¹³

1) Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ ثَمَانُونَ وَسْقٍ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقٍ شَعِيرٍ فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ يُمَضِّيَ لَهُنَّ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الْأَرْضَ. (رواه البخاري).

Artinya: "Diriwayatkan dari Abdullah bin 'Umar r.a. bahwasanya Nabi Saw. memperkerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaibar dengan ketentuan separuh dari hasilnya berupa kurma atau sayuran untuk pekerja. Beliau membagikan hasilnya kepada istri-istri Beliau sebanyak seratus wasaq, delapan puluh wasaq kurma, dan dua puluh wasaq gandum. Pada zamannya, 'Umar membagikan tanah Khaibar. Maka istri-istri Nabi ada yang mendapatkan air (sumur), tanah atau seperti hak mereka sebelumnya. Dan di antara mereka ada yang memilih tanah dan ada juga yang memilih menerima hak dan hasilnya. Sedangkan Aisyah r.a. memilih tanah." (HR. Bukhari).¹⁴

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ لَوْ تَرَكْتُ الْمُخَابِرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ أَيْ عَمْرُو إِنِّي أَعْطِيهِمْ وَأَغْنِيهِمْ وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ

¹³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, ..., Hal. 168-169.

¹⁴ Lidwa Pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Bukhari*, Hadits No - 2160.

عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا. (رواه البخاري).

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Amru bin Dinar; Aku berkata kepada Thawus: “Mengapa tidak kau tinggalkan mukhabarah sementara mereka beranggapan bahwa Nabi Saw. melarang mereka?” Dia, yaitu ‘Amru berkata: “Sungguh aku telah memberi dan mengenalkan pengetahuan yang cukup kepada mereka dan sesungguhnya orang yang paling mengerti dari mereka telah mengabarkan kepadaku, yakni Ibnu ‘Abbas r.a. bahwa Nabi tidak melarang dari itu tetapi beliau bersabda: Seorang dari kalian memberikan kepada saudaranya lebih baik baginya daripada dia mengambil dengan upah tertentu.” (HR. Al-Bukhari).¹⁵

2) Ijma’

Para sahabat telah sepakat baik melalui ucapan maupun perbuatan mengenai disyariatkannya *muzara’ah* atau *mukhabarah*, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya. Dan *muzara’ah* atau *mukhabarah* ini termasuk ke dalam syariat yang turun-menurun (*syari’ah mutawaritsah*). Di katakan demikian karena telah dipraktikkan oleh ulama Salaf dan ulama Khalaf.

3) Akal

Mukhabarah termasuk akad *syirkah* terhadap harta salah satu dari orang yang berserikat, namun dalam *mukhabarah* yang dijadikan objek akad adalah tanah dan pekerjaan dari pihak lain,

¹⁵ *Ibid.*, Hadits No. 2162.

yaitu petani. Di perbolehkannya *mukhabarah* ini di-*qiyas*-kan (dianalogikan) terdapat akad *mudharabah*. Dalam keduanya, baik *mukhabarah* maupun *mudharabah* terdapat manfaat, yaitu untuk saling tolong-menolong dan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam *mukhabarah* manfaatnya adalah pemilik tanah yang tidak memungkinkan mengolah tanahnya sendirian membutuhkan seorang petani untuk membantu mengolah tanahnya, begitu pun petani membutuhkan pekerjaan mengolah tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dalam hal ini terdapat hubungan timbal balik di antara keduanya.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Jufar juga Imam al-Syafi'i berpendapat hukum *muzara'ah* atau *mukhabarah* tidak diperbolehkan secara mutlak. Mereka berargumen dengan dalil hadits dan akal.¹⁶

1) Hadits

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ عُمُو مَتِّهِ أَتَاهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَوَا عِيَّةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ قَالَ قُلْنَا وَمَا ذَاكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلَا يُكَارِبْهَا بِثَلْثٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى. (رواه أبو داود).

¹⁶ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, ..., Hal. 171.

Artinya: “Di riwayatkan dari Rafi’ bin Khadij, ia berkata; Dahulu kami pernah melakukan mukhabarah (menyewakan tanah kepada petani dengan upah sebagian hasil bumi seperti sepertiga atau seperempat) pada masa Rasulullah. Kemudian ia menyebutkan bahwa sebagian pamannya datang kepadanya dan berkata; Rasulullah telah melarang dari suatu perkara yang dahulu memberikan manfaat kepada kami sedangkan menaati Allah dan Rasul-Nya adalah lebih bermanfaat bagi kita. Rafi’ berkata; maka kami katakan; apakah itu? Ia berkata; Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaknya ia menanamnya atau meminta saudaranya untuk menanamnya, dan tidak menyewakannya dengan sepertiga dan seperempat dan tidak pula dengan upah makanan tertentu.” (HR. Abu Dawud).¹⁷

2) Akal

Menyewakan sesuatu yang dihasilkan dari bumi seperdua, sepertiga, seperempat, dan semisalnya adalah menyewakan sesuatu dengan imbalan yang tidak jelas ukurannya atau belum ada, sehingga keuntungan yang akan dibagi sejak semula tidak jelas. Oleh karena itu objek akad seperti ini yang membuat akad tidak sah.¹⁸

Adapun hadits yang melarang tadi maksudnya hanya “apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang di antara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh

¹⁷ Lidwa Pustaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadits, *Kitab Abu Dawud*, Hadits No - 2947.

¹⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, ..., Hal. 173.

junjungan kita Nabi SAW. dalam hadits tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Pendapat inipun dikuatkan dengan alasan bila dipandang dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak. Memang, kalau kita selidiki hasil dari adanya parogan ini terhadap umum, sudah tentu kita akan lekas mengambil keputusan yang sesuai dengan pendapat yang kedua ini.¹⁹

Menurut kaul yang terpilih, *mukhabarah* itu boleh, yaitu dengan menakwil hadits yang melarang *mukhabarah*, bahwa larangan dalam hadits tersebut berlaku pada *mukhabarah* yang pembagian hasilnya ditentukan dengan dasar pemetaan (misalnya, yang sebelah barat hasilnya untuk pemilik tanah, dan yang sebelah timur hasilnya untuk penanam).

Kalau pembagian hasilnya dengan dasar pemetaan seperti itu, menurut mazhab Syafi'i jelas batal/ tidak sah. (Sebab, bisa jadi tanaman yang sebelah timur berbuah dan yang sebelah barat tidak berbuah, atau sebaliknya, maka ada pihak yang dirugikan).²⁰

c. Rukun dan Syarat *Mukhabarah*

Karena pengertian *Muzara'ah* dan *mukhabarah* hampir sama, hanya yang membedakannya adalah modal. Maka rukun *mukhabarah* dan *muzara'ah* sama saja. Jumhur ulama yang membolehkan akad

¹⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014, Hal. 302-303.

²⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyaar fii Alli Ghaayatil Iktishaar*, Surabaya: PT Bima Ilmu, 1997, Hal. 200-201.

muzara'ah atau *mukhabarah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah.
- 2) Petani penggarap.
- 3) Objek *al-mukhabarah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
- 4) Ijab dan kabul. Contoh ijab dan kabul: “Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Petani penggarap menjawab: “Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka hal ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (kabul) akad *mukhabarah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.

Mukhabarah memiliki syarat yang sama dengan *muzara'ah*, di mana keduanya merupakan akad pekerjaan yang hanya boleh dilakukan setelah tercukupinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Adapun syarat-syaratnya menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- 1) Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah balig dan berakal.

- 2) Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.
- 3) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
 - a) Menurut adat di kalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *mukhabarah* tidak sah.
 - b) Batas-batas tanah itu jelas.
 - c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *mukhabarah* tidak sah.
- 4) Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
 - a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
 - b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 - c) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh

hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

- 5) Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *mukhabarah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh karena itu, jangka waktunya harus jelas untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.²¹

d. Akibat Hukum Akad *Mukhabarah*

Menurut Jumhur ulama (yang membolehkan akad *mukhabarah*), apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, maka akibat hukumnya adalah:

- 1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan pemeliharaan pertanian tersebut.
- 2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya perairan, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- 3) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 4) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hal. 115-117.

- 5) Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya. Lebih lanjut, akad itu dapat dipertimbangkan oleh ahli waris, apakah akan diteruskan atau tidak.²²

e. Zakat Mukhabarah

Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab). Maka dalam kerja sama seperti ini salah satu atau keduanya (pemilik sawah/ ladang dan penggarap) membayar zakat bila telah nisab.

Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam *mukhabarah*, yang wajib zakat adalah penggarap (petani), karena dialah hakikatnya yang menanam, sedangkan pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih berasal dari keduanya jika sudah senisab, sebelum pendapatan dibagi dua.

Menurut Yusuf Qardawi, bila pemilik itu menyerahkan penggarapan tanahnya kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat dikenakan atas kedua bagian pendapatan masing-masing bila cukup senisab. Bila bagian salah seorang cukup senisab, sedangkan yang seorang lagi tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, Hal. 278.

cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup senisab tidak wajib zakat. Tetapi Imam Syafi'i, berpendapat bahwa keduanya dipandang satu orang, yang oleh karena itu wajib secara bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai *lima wasaq*: masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.²³

f. Hikmah Mukhabarah

Ketahuilah bahwa banyak sekali orang yang memiliki binatang ternak atau hewan pembajak dan mempunyai kemampuan untuk menggarap tanah atau menghasilkannya, tetapi ia tidak memiliki tanah. Juga banyak sekali orang yang mempunyai tanah yang layak untuk ditanami, tetapi mereka tidak memiliki hewan pembajak dan tidak mampu untuk menggarap tanah.

Apabila kedua orang tersebut saling melakukan perjanjian dalam sebuah kerja sama, di mana yang satu memberikan tanah dan benih, dan yang satunya lagi memberikan tenaganya atau hewannya untuk menggarap tanah, kemudian masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasil tanah tersebut, maka sesungguhnya hal tersebut sangat berarti. Namun, apabila di dalamnya tidak memberikan sebuah faedah kecuali menghidupkan tanah dan memperluas lahan pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar di antara beberapa sumber, maka akan tersa cukup.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat...*, hal. 118-119.

Di samping itu, ada juga hikmah lain, yaitu saling bertukar manfaat di antara kedua orang sehingga dapat melahirkan sebuah persahabatan dan rasa saling menyayangi antar sesama manusia. Dengan hal ini, seseorang juga dapat memiliki keistimewaan sifat amanah (dapat dipercaya). Semua itu adalah hikmah yang tinggi dan merupakan manfaat yang amat besar yang kembali kepada semua orang.²⁴

2. Teori Ikhlas

Para ahli menggambarkan tentang kajian teori ikhlas ini dalam berbagai perspektif, antara lain Yusuf Qardhawi mengutip pandangan Imam Al-Ghazali berkata: “Ketahuilah bahwa segala sesuatu digambarkan mudah bercampur dengan sesuatu yang lain. Jika bersih dari pencampurannya dan bersih darinya, maka itulah yang disebut ikhlas”.²⁵

Sedangkan menurut Nurcholish Madjid, keikhlasan setiap hamba Allah setingkat dengan martabat dan kedudukan; antara lain golongan *Al-Abrar* (pelaku kebajikan) ialah dengan keikhlasan amalnya itu, bisa menyelamatkan dirinya dari *riya'* baik yang nampak maupun tersembunyi dan tujuannya memenuhi keinginan diri, yakni mengharap limpahan pahala dan kebahagiaan di akhirat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang ikhlas, serta menghindarkan diri dari kepedihan

²⁴ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006, Hal. 488-490.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Niat dan Ikhlas*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008, Hal. 81.

azab dan perhitungan (Al-Hisab) yang buruk sebagaimana diancamkan Allah kepada orang yang tidak ikhlas.

Selanjutnya, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa ikhlas adalah meniadakan penglihatan untuk peranan diri sendiri dalam amalnya, jadi keikhlasan ialah tidak lain daripada kesaksiannya akan adanya hak pada Allah Yang Maha Benar semata, untuk membuat orang itu bergerak atau diam, tanpa ia melihat adanya daya kemampuan pada dirinya sendiri.²⁶

Ini merupakan realisasi dari makna firman Allah dalam surat Al-Fatihah ayat 5 yaitu, “*Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan*” bukan dengan diri kita sendiri ataupun daya dan kemampuan kita. Keikhlasan ini merupakan tingkat yang tinggi daripada kedua tingkatan sebelumnya.

Dalam kajian teori ikhlas digambarkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT. antara lain Surah Al-An'am Ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.²⁷

Artinya: “*Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam*”²⁸

Menurut ajaran Islam, hidup ini adalah untuk beribadah, bekerja dan berbuat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Pada hakikatnya semua kebaikan itu, kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja sepatutnya hanya dipersembahkan kepada Allah semata, bukan

²⁶ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1999, Hal. 48-49.

²⁷ QS. Al-An'am [6] : 162.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013, Hal. 76.

kepada selain-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah At-Taubah ayat 5 antara lain:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.²⁹

Artinya: “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.³⁰

Beberapa ayat di atas menegaskan bahwa beribadah ataupun bekerja dengan ikhlas adalah satu-satunya tugas dan kewajiban manusia kepada Allah SWT. dan seluruh aktivitas hidup dan kewajiban manusia adalah dalam rangka pengabdian ibadah serta perilaku ketauhidan yang jauh dari syirik serta jauh dari kesesatan.³¹

3. Teori Keadilan dalam Islam

Terkait dengan keadilan ini, suatu istilah yang hanya dapat dirasakan dan juga dapat dilihat. Adapun bentuk keadilan dalam perspektif Islam sebagai mana yang disebutkan dalam Surah An-Nisa’ ayat 135:

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا³²

Artinya “Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu alih-alih menegakkan keadilan”.³³

²⁹ QS. At-Taubah [9] : 5.

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*, ..., Hal. 103.

³¹ M. Amin Syukur, *Tasawuf Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Hal. 120.

³² QS. An-Nisa’ [4] : 135.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*, ..., Hal. 51.

Dalam kehidupan ekonomi, keadilan memiliki pengaruh yang lebih luas, apabila ada kecurangan dalam bidang ekonomi dan keuangan akan berdampak serius pada kehidupan sosial pada suatu masyarakat. Disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 85:

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ³⁴

Artinya “Penuhilah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu mengurangi jatah orang lain”.³⁵

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa berbuat kecurangan dalam bidang ekonomi dianggap sebagai perbuatan yang dzolim dan merusak karena perilaku sebagian manusia yang tamak.

Bentuk keadilan sudah selayaknya harus ditegakkan menurut ajaran Islam dalam berbagai aspek termasuk keadilan dalam bagi hasil bidang pertanian agar terdapat keseimbangan baik ditinjau dari segi perasaan para pihak dan juga pandangan seseorang. Semua yang ada di alam ini bersumber dari kehendak Tuhan yang mutlak, ini merupakan kesatuan yang sempurna dan semua bagian yang ada di dalamnya terikat dan berjalan bersama bagian-bagian yang lainnya, inilah makna keadilan dalam penelitian yang lebih luas.³⁶

Dalam teori ini lebih dikhususkan pada kajian keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk, keadilan yang harus diwujudkan dalam bentuk ini adalah refleksi dari tugas kekhalifahan manusia di muka bumi. Manusia dituntut untuk saling memperlakukan saudaranya dengan baik

³⁴ QS. Al-A'raf [8] : 85.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*, ..., Hal. 82.

³⁶ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1984, Hal. 26-27.

dan benar, penuh kasih sayang, saling tolong menolong dan memiliki tenggang rasa, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Tuntutan yang mendasar bagi manusia dalam masalah kemasyarakatan adalah mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan tuntutan pribadi dan tuntutan kepentingan masyarakatnya atau kepentingan dan kebutuhan bersama. Apabila seseorang membiarkan orang lain dalam kesusahan dan tidak mengacuhkan kepentingan masyarakat, tetapi hanya mementingkan diri sendiri maka sikap atau tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kezaliman. Demikian pula halnya dengan sikap yang membiarkan masyarakat untuk tidak memperhatikan individunya sendiri, yakni masyarakat sebagai sebuah kelompok sosial yang telah acuh terhadap kehidupan individu-individu di dalamnya, dengan adanya sikap acuh tak acuh dalam kehidupan masyarakat maka akan terjadi jurang pemisah yang semakin hari semakin meluas sejalan dengan itu terjadi pembiaran secara tidak langsung antara individu yang memiliki kesejahteraan ekonomi dengan individu yang kekurangan di bidang ekonomi.³⁷

Dalam kajian ekonomi Islam, bumi dengan segala isinya diciptakan oleh Allah untuk kesejahteraan umat manusia, yang dalam praktiknya bumi jualah harus melalui proses pengelolaan yang produktif dalam mengolah bumi (lahan), dalam hal ini manusia diberi akal untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan keahliannya untuk

³⁷ *Ibid.*, ..., Hal 34-36.

memberdayakan sumber daya alam yang bermanfaat untuk keperluan manusia.

Dalam ajaran Islam digambarkan bahwa tanah sebagai suatu faktor produksi yang penting untuk dikelola manusia, dimana Allah telah menurunkan hujan untuk membasahi tanah yang tandus sehingga dapat ditanami oleh manusia.

Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Sajdah Ayat 27:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ
أَنْعَامُهُمْ وَانْفُسُهُمْ.³⁸

Artinya: *“Dan apakah mereka tidak melihat bahwa Kami menghalau air ke bumi yang tandus, lalu Kami keluarkan dengannya tanam-tanaman yang darinya makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri.”*³⁹

Dari ayat di atas menurut Quraish Shihab ayat yang lalu mengecam kaum musyrikin yang tidak mendengar dan menarik pelajaran dari perjalanan mereka melalui pemukiman dan peninggalan generasi terdahulu, kini melalui ayat di atas kecaman dilanjutkan dengan menyatakan: Apakah mereka mengingkari keniscayaan Kiamat dengan berdalih kalau mereka terkubur tidak mungkin akan hidup lagi, *dan apakah mereka tidak melihat dan memerhatikan bahwa Kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus*, baik karena ulah manusia maupun karena terjadinya kemarau panjang, *lalu Kami keluarkan*

³⁸ QS. Al-Sajdah [32] : 27.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*, ..., Hal. 210.

dari kedalaman tanah, yakni tumbuhan, *dengannya*, yakni dengan ait hujan itu, *tanam-tanaman* serta rerumputan yang *darinya* dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri pun dapat makan.⁴⁰

Berdasarkan surat sajadah dan penafsirannya di atas menggambarkan bahwa betapa adilnya Allah SWT. selain dia menciptakan tanah dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya Allah juga memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mengelola bumi dengan penuh bijaksana untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Menurut Majid Khadduri, ada ayat-ayat lain yang memerintahkan tentang keadilan khususnya di bidang muamalat terdapat pada surah Al-Baqarah Ayat 282 :

وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ⁴¹

Artinya “...Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya secara adil...”.⁴²

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa perintah keadilan itu meliputi aspek-aspek kehidupan manusia. Majid Khadduri, dalam bukunya yang berjudul Teologi Keadilan (Perspektif Islam) mengklasifikasikan ke dalam 8 aspek: keadilan politik, keadilan teologis,

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 10*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Hal. 397.

⁴¹ QS. Al-Baqarah [2] : 282.

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka, ...*, Hal. 25.

keadilan fillosofis, keadilan etis, keadilan legal, keadilan di antara bangsa-bangsa, dan keadilan sosial.⁴³

Menurut Al-Raghib Al-Asfahani, keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (fi'il) '*adala* dan *mashdarnya* adalah *al-adl* dan *al-idl*. *As-'adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh *bashirah* (akal fikiran), dan *al-'idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidang hukum dan contoh kedua antara lain: keadilan dalam timbangan, ukuran dan hitungan.⁴⁴

Selanjutnya Quraish Shihab mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan.⁴⁵

Dari beberapa macam makna keadilan tersebut di atas, para pakar agama Islam, pada umumnya merumuskan menjadi empat makna. Pertama, adil dalam arti sama. Jika dikatakan bahwa seseorang itu adil, artinya dia memperlakukan sama antara orang yang satu dengan orang lain.

Kedua, adil dalam arti seimbang. Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian/ proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya

⁴³ Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, Hal. 13-14.

⁴⁴ Al-Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 2009, Hal. 552.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, Hal. 111.

ditentukan oleh fungsi yang diharapkan. Petunjuk Al-Qur'an yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, seperti perbedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan.

Ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya. Lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman.

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.

Selain nilai keadilan dalam Islam yang telah diuraikan di atas, hubungannya dengan kajian dan penelitian ini terkait dengan produksi dan kepemilikan tanah pertanian. Secara umum, produksi sebagai proses merubah sesuatu dari tidak bermanfaat menjadi bermanfaat, atau dari tidak bernilai menjadi bernilai ekonomi, sehingga dalam kajian keadilan ekonomi bahwa barang menjadi bernilai ekonomi jika barang tersebut menimbulkan permintaan melalui tingkat harga yang berlaku demikian pula dengan jasa tenaga karyawan yang dihasilkan, pelayanan (produksi jasa) seseorang akan menciptakan nilai manfaat jika dengan pelayanan tersebut menimbulkan manfaat bagi orang lain. Dengan demikian ukuran

kesejahteraan masyarakat adalah dapat diukur dengan tingkat pendapatannya serta mampu memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari.

4. Teori Perjanjian

Salim H.S. mengatakan bahwa istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian, yaitu: teori lama dan teori baru. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁶

Wujud perjanjian dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. *Perjanjian tertulis*, yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis yang berisi kata-kata kesepakatan dalam ikatan perjanjian berkaitan dengan tindakan dan harta kekayaan. Perjanjian tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak.
- b. *Perjanjian tidak tertulis*, adalah perjanjian yang dilaksanakan secara lisan. Perjanjian secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum karena bukti lisan bukanlah alat bukti dalam perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian lisan sangat bergantung pada kejujuran para pihak yang

⁴⁶ R. Joni Bambang, *Hukum Ketatanegaraan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, Hal. 82.

semula saling percaya untuk mengingatkan diri dalam melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan harta kekayaan.

Setiap perikatan yang dibuat melalui perjanjian menimbulkan dua akibat hukum, yaitu kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang dipikul oleh suatu pihak dan hak-hak atau manfaat yang diperoleh oleh pihak lain, yaitu hak-hak untuk menuntut dilaksanakannya suatu yang disanggupi dalam perjanjian itu. Dengan demikian, subjek perikatan yang utama adalah para pihak yang melakukan perjanjian.⁴⁷

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut.

a. Adanya Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) Kedua Belah Pihak

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

b. Kecakapan Bertindak

Kesepakatan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang

⁴⁷ *Ibid.*, Hal. 84-86.

ditentukan oleh Undang-undang. Orang yang cakap atau wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa.

c. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp Derovereenkomst*)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi terdiri atas: (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu, dan (3) tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPdata). Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.

d. Adanya Causa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Dalam Pasal 1320 KUHPdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Dalam Pasal 1337 KUHPdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum.⁴⁸

C. Konsep penelitian

1. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan dan perihal mempraktikkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu

⁴⁸ *Ibid.*, Hal. 87-91.

kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁴⁹

2. Pengertian *Mukhabarah*

Menurut bahasa *mukhabarah* (المُخَابَرَةُ) Adalah

مُفَاعَلَةٌ (wazan) الْحَبَارُ مِنْ الْأَرْضِ الْيَنَّةِ yang

bermakna tanah yang lunak). Sedangkan menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh para ulama di bawah ini:

a. Hanafiyah:

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِيَعُضِ الْخَارِجِ .

Artinya: “Akad terhadap tanaman dengan sesuatu yang dihasilkan”.

b. Malikiyah

الشَّرَكَةُ فِي الزَّرْعِ .

Artinya: “Perserikatan atau kerja sama dalam pertanian.”

c. Syafi’iyah

أَنْ يَدْفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْضًا لَهُ لِيَزْرِعَهَا وَتَكُونَ الْعُلَّةُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا يَشْتَرِ طَان .

Artinya: “Seseorang yang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanaminya, sedangkan hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama.”

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Hal. 1180.

d. Hanabilah:

دَفْعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزَرُ عَنْهَا وَيَعْمَلُ عَلَيْهَا .

Artinya: “Menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanamnya dan mengelolanya.”

دَفْعُ أَرْضٍ وَحَبِّ لِمَنْ يَزَرُّهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ أَوْ مَزْرُوعٍ لِمَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْمُتَحَصِّلِ .

Artinya “Menyerahkan tanah dan biji-bijian kepada orang yang akan menanamnya dan mengelolanya dengan imbalan hasilnya yang telah ditentukan.”

Dari definisi yang telah dikemukakan para ulama di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *mukhabarah* adalah “akad kerja sama yang berhubungan dengan bercocok tanam dengan imbalan tertentu atas hasilnya menurut kesepakatan bersama.”⁵⁰

3. Pengertian Ikhlas

Pengertian ikhlas dalam bahasa Arab artinya murni, tiada bercampur, bersih dan jernih. Menurut istilah ikhlas adalah suci dalam niat, bersih batin dalam beramal, tidak berpura-pura, lurus hati dalam bertindak, jauh dari *riya'* dan kemegahan dalam berlaku berbuat, mengharapkan ridha Allah semata-mata. Ikhlas merupakan amalan hati yang paling utama, paling tinggi dan paling pokok, ikhlas merupakan hakikat dan kunci dakwah para rasul sejak dahulu kala.⁵¹ Menurut Erbe Sentanu, ikhlas merupakan *Default Factory Setting* manusia, yakni manusia sudah dilahirkan dengan fitrah yang murni dari Ilahi, hanya saja

⁵⁰ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, ..., Hal. 167-168.

⁵¹ Sidi Gazalba, *Asas Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975, Hal 188.

manusia itu sendirilah yang senang mendiskonnya sehingga kesempurnaannya menjadi berkurang, ini akibat berbagai pengalaman hidup dan ketidaktepatan dalam berfikir atau berprasangka, sehingga hidupnya pun menjadi penuh kesulitan.⁵² Iklas yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pasrah tanpa mengharapkan sesuatu, kecuali keridhaan Allah.⁵³

4. Pengertian Keadilan

Keadilan merupakan istilah yang sering kita dengar dalam perbincangan sehari-hari, dimana setiap tindakan menuntut kesamaan hak dalam pemenuhan kewajiban dan keadilan menjadi hal yang tak terpisahkan. Secara definisi arti keadilan terdapat beberapa rumusan sederhana yang menjawab tentang makna keadilan. Namun senyatanya memahami tentang makna keadilan tidak semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para pakar, sebab berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang memerlukan pengkajian secara mendalam sampai pada hakikat dari keadilan itu sendiri.⁵⁴

Beberapa pandangan para pakar tentang keadilan antara lain menurut Riduan Halim, menyatakan keadilan adalah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil “neraca

⁵² Erbe Sentanu, *Quantum Iklas: Teknologi Aktivasi Kekuatan Hati*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009, Hal. 37.

⁵³ Damanhuri, *Akhlak Tasawuf*, Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010, Hal. 170.

⁵⁴ Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jendral Sudirman, 2010, Hal. 105.

hukum” yakni “takaran hak dan kewajiban”, serta keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁵⁵

Keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaannya berdasarkan dalil takaran hak adalah kewajiban:

- a. Hak setiap orang itu besar kecilnya tergantung pada atau selaras dengan besar kecil kewajibannya.
- b. Dalam keadaan yang wajar, tidaklah benar kalau seseorang dapat memperoleh haknya secara tidak selaras dengan kewajibannya atau tidak pula selaras kalau seseorang itu dibebankan kewajiban yang tidak selaras dengan haknya.
- c. Tiada seorangpun dapat memperoleh haknya tanpa ia melaksanakan kewajibannya, baik sebelum maupun sesudahnya, dan dengan demikian pula sebaliknya tiada seorangpun yang dapat dibebankan kewajibannya tanpa ia memperoleh haknya, baik sebelum maupun sesudahnya. Misalnya setiap pemilik benda atau pemegang hak milik atas suatu benda harus membayar pajak kekayaannya atas benda miliknya itu dalam jumlah tertentu yang ditentukan menurut harga atau nilai benda tersebut, maka semakin mahal pula pajak yang harus dibayar oleh pemiliknya dan demikian pula sebaliknya. Demikian juga halnya upah seorang pegawai tentunya diselaraskan dengan berat ringan pekerjaannya.⁵⁶

⁵⁵ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, Hal. 176.

⁵⁶ *Ibid.*, Hal. 177.

5. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵⁷

Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak (*contracts*) dan *overeenkomst* (dalam bahasa belanda). Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan dan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbintenis*).

Pengertian perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Boedi Harsono adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian yang mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang bertindak atas tanah tersebut menurut imbangannya yang telah disetujui bersama.⁵⁸

⁵⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan XIII*, Jakarta: Intermasa, 1991. Hal. 1.

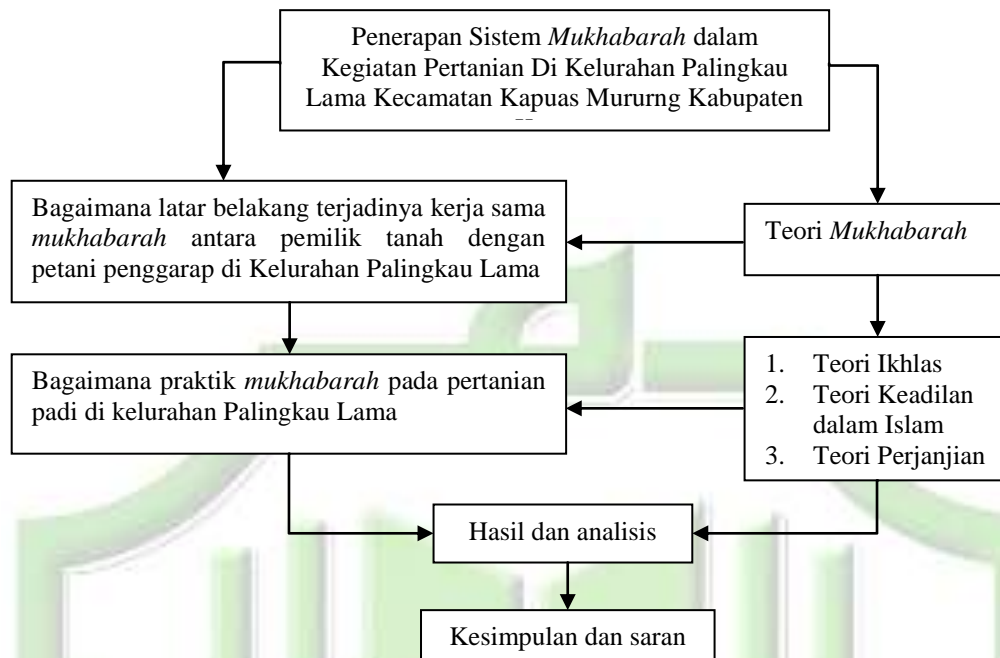
⁵⁸ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999, Hal. 118.

D. Kerangka Pikir

Penelitian ini pada awalnya berdasarkan pengamatan dan pencermatan penulis tentang adanya penerapan sistem *mukhabarah* di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas, dalam pelaksanaan *mukhabarah* dikalangan masyarakat petani kelurahan Palingkau Lama mereka melakukan kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Menurut pengamatan penulis, Kemitraan bisnis yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan penggarap melalui cara bagi hasil cukup membantu masyarakat ekonomi lemah yang tidak memiliki lahan pertanian namun memiliki keahlian dalam bertani. Kabupaten kapuas yang difokuskan pada 3 masalah yaitu latar belakang terjadinya kerja sama *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan penggarap tanah di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, praktik *mukhabarah* pada pertanian padi antara pemilik tanah dengan penggarap tanah di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas, tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan bagi hasil dengan sistem *mukhabarah* di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

E. Bagan penelitian

Berikut adalah bagan penelitian:

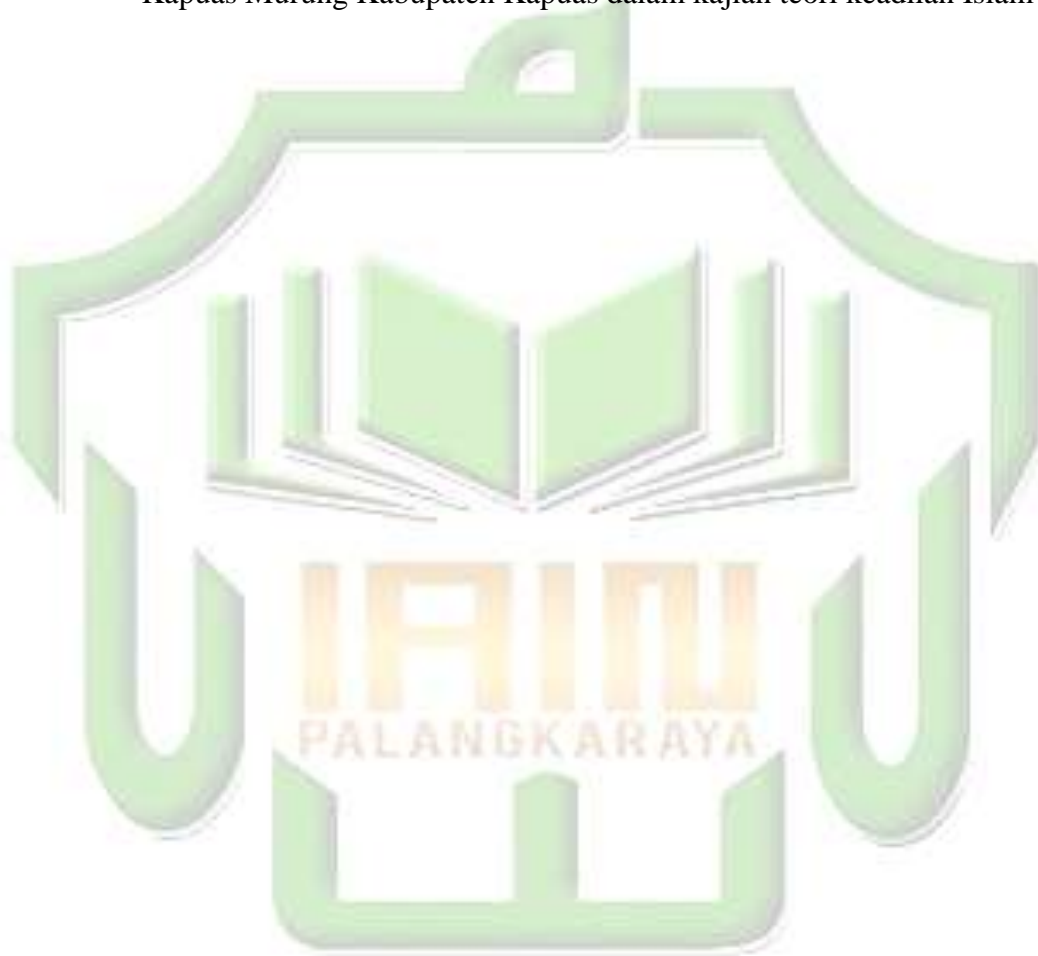


F. Pertanyaan Penelitian

1. Latar belakang terjadinya kerja sama *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.
 - a. Apa yang melatar belakangi bapak pemilik tanah maminta petani penggarap mengelola lahan pertanian?
 - b. Apa yang melatar belakangi petani penggarap bersedia menggarap tanah pertanian tersebut?
 - c. Apakah bapak mengetahui bagaimana *mukhabarah* atau bagi hasil penggarapan lahan pertanian dalam ekonomi syariah? (Di tanya kepada Pemilik tanah dan Penggarap tanah).

2. Praktik *mukhabarah* pada pertanian padi di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.
 - a. Bagaimana cara bapak ketika memulai kerja sama bagi hasil dalam penggarapan lahan pertanian? (Di tanya kepada pemilik tanah dan penggarap tanah).
 - b. Apa saja yang diperbincangkan sebelum penggarapan tanah pertanian dengan cara mukhabarah itu dilakukan?
 - c. Apakah biaya pembersihan lahan ditanggung oleh pemilik tanah atau petani penggarap?
 - d. Apakah bibit padi yang akan ditanam disepakati oleh kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak?
 - e. Ketika panen padi telah tiba apakah mengetam (memanen) diserahkan kepada penggarap tanah atau pemilik tanah?
 - f. Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik tanah dengan penggarap terhadap hasil padi tersebut?
 - g. Jika terjadi gagal panen, bagaimana pemilik tanah dan petani penggarap dalam menyikapinya?
3. Tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem *mukhabarah* di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.
 - a. Bagaimana latar belakang terjadinya *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan penggarap tanah di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dalam kajian Fiqih?

- b. Bagaimana praktik terjadinya *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan penggarap tanah di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dalam kajian teori ikhlas?
- c. Bagaimana praktik terjadinya *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan penggarap tanah di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dalam kajian teori keadilan Islam?



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan setelah seminar proposal dan mendapat izin penelitian dari dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, selanjutnya menuangkan hasil penelitian dan konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan kurang lebih selama 3 bulan.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), berlokasi di Kelurahan Palingkau Lama. Alasan memilih lokasi ini karena masyarakatnya bekerja sebagai petani padi dan ada di antara masyarakat yang melakukan *mukhabarah* atau bagi hasil dalam melakukan aktifitas pertanian padi tersebut.

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Dalam hal ini peneliti mengadakan pertemuan dan bertanya kepada para petani, terutama petani padi yang melakukan praktik *mukhabarah* atau bagi hasil di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah praktik *mukhabarah* hasil pertanian di kalangan masyarakat petani kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas. Sedangkan Subjeknya adalah pemilik tanah pertanian dan petani penggarap di kelurahan palingkau lama. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu 10 orang terdiri dari 5 pemilik tanah dan 5 petani penggarap. Dengan kriteria sebagai berikut yaitu petani yang sudah melakukan akad *mukhabarah* selama 1 tahun lebih atau yang sudah melakukan bagi hasil dengan sistem *mukhabarah* beberapa kali, pemilik tanah yang memiliki luas tanah lebih dari setengah hektar dan pertaniannya jenis padi, serta mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁵⁹ Teknik penelitian data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apapun, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan penelitian.⁶⁰ Jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif, dalam hal ini

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013, Hal. 224.

⁶⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, Hal. 161.

peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁶¹ Dalam hal ini penulis mengadakan observasi terhadap pemilik tanah dan petani penggarap yang melakukan praktik bagi hasil dengan sistem *mukhabarah* di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas.

2. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁶² Dalam penelitian ini, yang akan diwawancarai yaitu 5 orang pemilik tanah dan 5 orang penggarap tanah yang melakukan akad bagi hasil dengan sistem *mukhabarah* di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas.
3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, ..., Hal. 227.

⁶² *Ibid.*, Hal. 231.

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶³ Penggunaan metode dokumentasi ini untuk memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan interview. Dokumentasinya berbentuk tulisan dan gambar. Dokumentasi yang berbentuk tulisan dapat berupa surat perjanjian antara pemilik tanah dengan petani penggarap jika akad *mukhabarah* tersebut dilakukan secara tertulis dan sertifikat hak milik tanah dari si pemilik tanah, sedangkan dokumentasi yang berbentuk gambar yaitu foto-foto pada saat di lapangan.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data penelitian tentang Penerapan sistem *mukhabarah* di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas, maka semua hasil pengamatan atau observasi, wawancara dan dokumentasi memang benar dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian. Oleh karena itu, keabsahan data dalam penelitian ini diyakini benar terjadi di lokasi penelitian, maka digunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

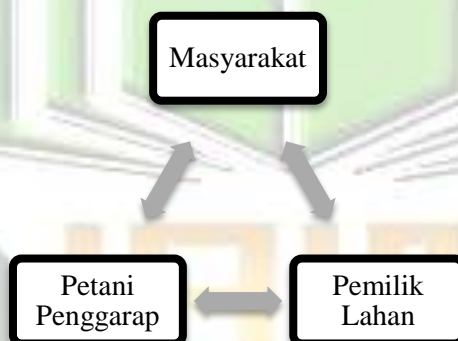
Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang

⁶³ *Ibid.*, Hal. 240.

berbeda dalam metode kualitatif. Menurut Patton yang dikutip Lexy J. Moleong, hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁶⁴

Adapun triangulasi sumber dalam penelitian ini adalah pertama informan (masyarakat) yang memberitahukan kepada penulis tentang adanya *mukhabarah* (bagi hasil) di kelurahan palingkau lama, kedua petani penggarap tanah dan yang ketiga pemilik tanah atau lahan pertanian. Untuk mudahnya tentang triangulasi sumber ini, peneliti buat dalam bentuk denah berikut ini:



F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, Hal. 178.

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Miles dan Huberman dalam bukunya "*Analisis Data Kualitatif*" yaitu:

1. Pengumpulan Data, pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.
2. Reduksi Data, merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
3. Penyajian Data, dalam penelitian penyajian data yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian ini meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan. Semua dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih.
4. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi, merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.⁶⁶

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, ..., Hal. 244.

⁶⁶ Matthew Milles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992, Hal. 16.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Kapuas

Pembentukan Kota Kuala Kapuas bertepatan dengan dimulainya pendirian Betang Sungei Pasah dibawah pimpinan Malik (gelar Raksapati I) pada tahun 1806, sebagai satu-satunya pemukiman adat di sekitar Kota Kuala Kapuas yang masih terdapat utuh serta tidak terkena bumi hangus sewaktu permulaan pembangunan kota di tahun 1863. Dengan mengacu pada tahun pendirian Betang Sungei Pasah tersebut hari jadi kota Kuala Kapuas ditetapkan pada tanggal 21 Maret 1806 (Kesimpulan hasil Lokakarya penyempurnaan buku Sejarah Kabupaten Kapuas dilangsungkan di Kuala Kapuas pada tanggal 1-2 Desember 1981). Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten baru terbentuk pada tanggal 21 Maret 1951. Dengan demikian, pada tahun 2009 kota Kuala Kapuas sudah berumur 204 tahun dan usia Pemerintah Kabupaten Kapuas sudah 59 tahun.⁶⁷

Kabupaten Kapuas adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah dengan ibukota terletak di Kuala Kapuas. Secara Geografis Kabupaten Kapuas terletak pada $0^{\circ} 8' 48''$ - $3^{\circ} 27' 00''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ} 2' 36''$ - $114^{\circ} 44' 00''$ Bujur Timur.

⁶⁷ Pemerintah Kabupaten Kapuas, *LAKIP Tahun 2009*, Kapuas: t.p, 2009, hal. 14-15.

Sungai yang melalui Kabupaten Kapuas terdiri dari Sungai Kapuas Murung dan Sungai Kapuas. Sungai Kapuas Murung memiliki panjang 66,375 km sedangkan Sungai Kapuas berada di wilayah Kabupaten Kapuas, membentang dari utara yaitu Kecamatan Kapuas Hulu sampai ke selatan di Kecamatan Kapuas Kuala.

Sungai Kapuas melintasi 7 kecamatan yang berada langsung di Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Kecamatan Kapuas Hulu, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Timpah, Kecamatan Mantangai, Kecamatan Basarang, Kapuas Barat dan Kecamatan Kapuas Hilir. Panjang Sungai Kapuas di wilayah Kabupaten Kapuas ± 600 km dengan lebar ± 500 m dengan kedalaman rata-rata 6 meter sehingga dapat dilayari kapal berukuran besar. Untuk Daerah Pesisir/Pantai Laut Jawa yang menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Kapuas adalah sepanjang 189,487 km.

Selain sungai-sungai diatas, di Kabupaten Kapuas juga terdapat 4 (empat) buah anjir/kanal yaitu :

- Anjir Serapat sepanjang ± 28 km yang menghubungkan Kuala Kapuas menuju Banjarmasin, wilayah Kalimantan Tengah sepanjang 14 km dan wilayah Kalimantan Selatan 14 km.
- Anjir Kalampan sepanjang 14,5 km yang menghubungkan Kota Mandomai Kecamatan Kapuas Barat ke Pulang Pisau, wilayah Kabupaten Pulang Pisau mengarah ke Palangkaraya, wilayah Kapuas sepanjang 9 km dari wilayah Pulang Pisau sepanjang 5,5 km.

- Anjir Basarang sepanjang ± 24 km yang menghubungkan Kuala Kapuas ke wilayah Pulang Pisau, wilayah Kapuas sepanjang 17 km dan wilayah Pulang Pisau sepanjang 7 km.
- Anjir Tamban sepanjang ± 24 km yang menghubungkan Kuala Kapuas menuju Banjarmasin, wilayah Kalimantan Tengah sepanjang 13 km dan wilayah Kalimantan Selatan 12 km.⁶⁸

Batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas secara administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara umum Luas Wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Kapuas yaitu 14.999 Km² atau 9,77% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan rincian sebagai berikut:

⁶⁸ Pokja Sanitasi Kabupaten Kapuas, *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kapuas Tahun 2014*, Kapuas: t.p, 2014, Hal. 1-2.

Tabel 4.1
Nama, Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/ Desa	Luas Wilayah			
			Administrasi		Terbangun	
			(Km ²)	(%) thd total	(Km ²)	(%) thd total
1	Kapuas Kuala	13	348,08	2,32	5,56	3,69
2	Tamban Catur	10	78,92	0,53	6,24	4,14
3	Kapuas Timur	7	202	1,35	7,59	5,03
4	Selat	10	111,74	0,74	32,22	21,37
5	Bataguh	15	282,26	1,88	8,94	5,93
6	Basarang	14	206	1,37	11,16	7,40
7	Kapuas Hilir	8	91	0,61	6,33	4,20
8	Pulau Petak	12	135	0,9	7,56	5,01
9	Kapuas Murung	23	288,45	1,92	5,48	3,63
10	Dadahup	13	202,55	1,35	4,91	3,25
11	Kapuas Barat	12	480	3,20	6,49	4,30
12	Mantangai	38	6.128	40,86	34,37	22,79
13	Timpah	9	2.016	13,44	1,80	1,19
14	Kapuas Tengah	13	1.160	7,73	7,41	4,91
15	Pasak Talawang	10	673	4,49	2,17	1,44
16	Kapuas Hulu	14	1.274	8,49	0,86	0,57
17	Mandau Talawang	10	1.322	8,81	1,76	1,17
Total		231	14.999	100	150,85	100

Sumber: *Kapuas Dalam Angka 2013*

Kabupaten Kapuas pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab dengan temperatur berkisar antara 21⁰ – 23⁰ Celsius dan maksimal mencapai 36⁰ Celsius. Intensitas penyinaran matahari selalu tinggi dan sumber daya air yang cukup banyak sehingga menyebabkan tingginya penguapan yang menimbulkan awan aktif/tebal. Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Desember, sedangkan bulan kering/kemarau jatuh pada bulan Juni sampai dengan September.

Topografi seluruh bentangan wilayah Kabupaten Kapuas relatif datar (0%-8%), dengan ketinggian antara 0-500 m diatas permukaan laut. Karakteristik wilayahnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian dengan dua karakteristik yang berbeda, yaitu bagian selatan merupakan dataran yang berawa-rawa, sedangkan bagian utara berbukit-bukit. Bagian utara merupakan daerah perbukitan, dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air laut dan merupakan daerah perbukitan/pengunungan dengan kemiringan + 15 – 25 derajat. Bagian selatan terdiri dari pantai dan rawa-rawa dengan ketinggian antara 0 – 5 meter dari permukaan air laut yang mempunyai elevasi 0% - 8% serta dipengaruhi oleh pasang surut dan merupakan daerah yang mempunyai potensi banjir yang cukup besar (air laut/pasang naik).

Kawasan pasang surut di bagian selatan merupakan daerah potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan kawasan non pasang surut di bagian utara merupakan potensi lahan perkebunan dan pertambangan.

Dominasi morfologi di Kabupaten Kapuas memperlihatkan bentuk morfologi daratan berelief rendah dengan ketinggian 1 – 4 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Mantangai berada pada wilayah dengan ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut, sedangkan Kecamatan Kapuas Tengah dan Kapuas Hulu merupakan wilayah kecamatan yang berada di kisaran lebih dari 500 meter diatas permukaan laut.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*, Hal. 3-4.

Perkembangan penduduk suatu daerah sangat dipengaruhi oleh perkembangan kelahiran, kematian dan migrasi (masuk dan keluar). Pertambahan jumlah penduduk akan memberi tekanan terhadap lingkungan meski keberadaannya sangat berperan penting dalam mendukung perkembangan wilayah. Konsentrasi penduduk tinggi disuatu tempat mencerminkan adanya potensi kegiatan ditempat tersebut. Jumlah penduduk wilayah Kabupaten Kapuas pada tahun 2012 seluruhnya berjumlah 339.262 jiwa.

Berdasarkan data Kapuas dalam Angka Tahun 2013, pada tahun 2012 kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Selat sebesar 55,46 jiwa/km² walaupun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 terjadi penurunan pertumbuhan penduduknya sebesar 0,61%. Sedangkan yang paling rendah kepadatan penduduknya ada di Kecamatan Mandau Talawang sebesar 4,16 jiwa/km² dengan tingkat pertumbuhan penduduknya juga mengalami penurunan dari tahun 2011 dan tahun 2012 sebesar 0,33%. Untuk kecamatan yang lain di Kabupaten Kapuas mengalami peningkatan dalam pertumbuhan penduduknya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 seperti Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Basarang, Kecamatan Kapuas Hilir, Kecamatan Pulau Petak, Kecamatan Kapuas Murung, Kecamatan Dadahup, Kecamatan Kapuas Barat, dan Kecamatan Mantangai.

Angka kepadatan penduduk bervariasi di setiap kecamatan, menandakan adanya perbedaan sebaran penduduk. Perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah dengan wilayah lainnya merupakan salah satu faktor penyebaran penduduk yang tidak merata. Daerah yang memiliki aktivitas perekonomian tinggi, seperti halnya Kecamatan Selat mengidentifikasi bahwa peningkatan aktivitas perekonomian di suatu wilayah menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk karena mobilitas penduduk, selain pertumbuhan secara alami. Kesempatan mendapatkan lapangan pekerjaan dan pembukaan usaha mandiri seperti kesempatan berdagang merupakan daya tarik terjadinya mobilitas penduduk dari wilayah lain ke wilayah yang merupakan daerah pengembangan ekonomi.⁷⁰

2. Kelurahan Palingkau Lama

Palingkau Lama adalah sebuah kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia. Dengan luas wilayah 4.900 Ha. Jumlah Rukun Tetangga sebanyak 18 RT. Kelurahan Palingkau Lama berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Tajepan.
- Sebelah Timur dengan Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
- Sebelah Selatan dengan Kelurahan Palingkau Baru.
- Sebelah Barat dengan UPT Palingkau Sejahtera (SP-2).⁷¹

⁷⁰ *Ibid.*, Hal. 7-8.

⁷¹ Profil Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang Penerapan sistem *mukhabarah* dalam kegiatan pertanian di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas, dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir), selanjutnya oleh pihak yang diwawancara bahasa yang mereka gunakan dalam menjawab pertanyaan penelitian antara lain yaitu dengan bahasa lokal.

Berikut ini peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan para petani penggarap dan pemilik tanah di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas. Di dalam penelitian ini peneliti mengambil 10 responden yaitu 5 pemilik tanah dan 5 petani penggarap. Adapun peneliti mengambil 10 responden dengan menggunakan teknik purposive sampling yakni peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil berdasarkan syarat-syarat tertentu. Lebih jelasnya berikut ini akan peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya kerja sama *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas

a. Pemilik Tanah

Hasil wawancara dengan Pemilik Tanah berdasarkan rumusan masalah pertama yaitu sebagai berikut:

1) Bapak S

Sebagaimana bapak S menjelaskan:

“Penggarapnya yang mendatangi aku, yang handak menggarap tanahku, aku ni bersedia ae tanahku yang digarap, daripada kada dihumai kan, oleh aku bahuma di lain jua, tanahku yang lain, yang di palingkau ni kada tahumai lagi, daripada kada tapakai, jadi ku serah akan ae lawan inya supaya dihumai, supaya bamanfaat lah. Kalo dalam ekonomi Islam kada tapi tahu pank, inya sesuai kesepakatan haja, mun setuju sama setuju sah ae sudah perjanjiannya yang penting adil, sama-sama setuju sudah.”
⁷²

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bapak S sebagai salah satu pemilik tanah menyatakan bahwa penggarap yang ingin menggarap tanah milik beliau, dan beliau bersedia jika tanahnya digarap oleh penggarap tanah, daripada tanah tersebut tidak digunakan jelas beliau, karena beliau bertani di tempat lain juga, tanah milik beliau yang lain, dan tanah yang ada di palingkau ini tidak terurus lagi, daripada tidak digunakan sebagaimana mestinya, jadi pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikelola, agar tanah tersebut bermanfaat. Beliau kurang mengetahui bagi hasil dalam ekonomi Islam, karena menurut beliau jika sudah sesuai dengan kesepakatan bersama, maka perjanjian tersebut sudah dianggap sah, yang penting adil dan sama-sama menyetujuinya.

⁷² Wawancara dengan Bapak S di Kelurahan Palingkau Lama, Kamis, 28-03-2019.

2) Bapak H. I

Sebagaimana bapak H. I menjelaskan:

“Aku ni kan sudah tuha, kada sanggup lagi menggarap tanah sebanyak itu, seadanya ja maksudnya, jadi sepalih ku serah akan lawan inya supaya inya yang menggarapnya dengan perjanjian dibagi 3 yaitu 2 gasan inya, 1 gasan aku. Masalah pembagian dalam ekonomi Islam tahu ae pank, cuman kita ambil yang mudahnya haja, sesuai akan kahandak kita ja, supaya adil kaitu nah, sama pada senang hati, yang penting pembagiannya harus jelas kalo, sudah setuju sama setuju, ya sudah disepakati kedua belah pihak lah.”⁷³

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bapak H. I sebagai salah satu pemilik tanah menyatakan bahwa yang melatar belakangi beliau menyuruh petani penggarap untuk menggarap tanahnya karena beliau sudah tua, dan tidak mampu lagi untuk mengelola tanah seluruhnya, sehingga beliau menyerahkan sebagian tanahnya kepada orang lain untuk digarap dengan perjanjian dibagi 3 yaitu 2/3 untuk petani penggarap dan 1/3 untuk pemilik tanah. Kemudian beliau menjelaskan kalau beliau cukup mengetahui bagi hasil dalam ekonomi Islam, tetapi mereka tidak terlalu terpaku dengan konsep Islam, disesuaikan dengan kehendak kedua belah pihak saja, agar sama-sama merasa adil dan yang penting pembagiannya harus jelas, sama-sama sudah disetujui kedua belah pihak yang berakad.

⁷³ Wawancara dengan Bapak H.I.di Kelurahan Palingkau Lama, Kamis, 28-03-2019.

3) Ibu R

Sebagaimana Ibu R menjelaskan:

“Aku kan sudah kada mampu lagi, mana sorangan, laki sudah kadada lagi, kada kuasa lagi menggawi oleh soranganannya, mana kejauhan menunti, jika ibarat nyubarang tu kada kawa ma anu sorangan, kadada bakawan lagi, anak-anak kadada yang bisa membantu lagi oleh sudah berkeluarga lawan jua baisi usaha masing-masing, jadi orang ae yang menggarap akan kayaitu nah. Mun bagi hasil dalam ekonomi Islam kada tapi tahu pank, kita nih kan menurut kekeluargaan ja, jadi pembagiannya menurut kesepakatan kami badua haja.”⁷⁴

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Ibu R sebagai salah satu pemilik tanah menyatakan bahwa beliau sudah tidak mampu lagi untuk bertani karena beliau hanya sendiri, tidak ada yang membantu beliau karena suaminya sudah meninggal sedangkan anak-anak beliau sudah berkeluarga dan mempunyai pekerjaan lain, jadi tanah tersebut diserahkan kepada orang lain untuk dikelola. Beliau kurang mengetahui bagi hasil dalam ekonomi Islam, pembagiannya menurut kesepakatan bersama dengan sistem kekeluargaan saja.

4) Bapak K

Sebagaimana Bapak K menjelaskan:

“Aku kalo handak menukar tanah pahumaan, cuman aku kada kawa menggawinya lantaran aku sibuk badagang ke pasar, jadi ku cari orang lain yang hakun mahumainya pas ada yang hakun, lalu ku tukari tanahnya tu, habis tu ba atur ae lagi pembagiannya kayapa bila sudah bahasil nah kaitu. Kada tapi tahu jua, kami tahunya ya bagi hasil tu pang, menurut kekeluargaan ja, sudah menurut kesepakatan

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu R di Kelurahan Palingkau Lama, Jum’at, 05-04-2019.

lawan perjanjian kami bersama, pas sudah sama-sama cocok, sama-sama akur dengan pembagiannya kaitu, jadi ae sudah, tinggal menggarapnya ae lagi.”⁷⁵

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak K sebagai salah satu pemilik tanah menyatakan bahwa beliau ingin membeli tanah atau lahan pertanian, tetapi beliau tidak bisa mengelolanya, dikarenakan sibuk berdagang ke pasar atau punya pekerjaan lain. Jadi beliau mencari orang yang bisa menggarap tanah pertanian tersebut, dan jika ada yang bersedia, maka beliau akan membeli tanah tersebut. setelah itu mulailah mengatur pembagiannya menurut perjanjian bersama. Beliau menjelaskan kalau beliau kurang mengetahui *mukhabarah* dalam ekonomi Islam, beliau hanya mengetahui bagi hasil secara kekeluargaan saja atau menurut kesepakatan bersama, jika sudah sama-sama setuju, maka mulailah penggarapan tanah tersebut dilakukan kata beliau.

5) Bapak AR

Sebagaimana Bapak AR menjelaskan:

“Aku kan ada gawian lain, jadi kada lagi aku maurus pahumaan tu, pas ada yang menakuni pahumaan tu handak mahumainya jarnya, ku pikir akan pas ae daripada kada jadi apa-apa tanah tu, baik orang yang mahumainya kan, hasilnya dibagi kena. Masalah ngintu tahu haja, cuman kita disini cara kekeluargaan ja bagi hasilnya, perjanjiannya secara lisan ja, nang pasti perjanjiannya sudah kita setuju basama-sama kaitu ae.”⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak K di Kelurahan Palingkau Lama, Kamis, 11-04-2019.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak AR di Kelurahan Palingkau Lama, Sabtu, 30-03-2019.

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak AR sebagai salah satu pemilik tanah menyatakan bahwa beliau ada pekerjaan lain, sehingga tidak dapat mengelola lahan pertanian tersebut, kebetulan ada petani yang menanyakan mengenai tanah tersebut dan ingin menggarapnya, beliau mengatakan daripada tanah tersebut tidak digunakan dan tidak ada hasilnya, lebih baik orang lain yang menggarapnya, kemudian hasilnya dapat dibagi antara kedua belah pihak. Kemudian beliau menjelaskan bahwa beliau mengetahui bagi hasil dalam Islam, tetapi kesepakatan mereka secara kekeluargaan saja, dan perjanjiannya secara lisan saja, yang pasti sudah disetujui kedua belah pihak.

b. Petani Penggarap

Hasil wawancara dengan Petani Penggarap berdasarkan rumusan masalah pertama yaitu sebagai berikut:

1) Bapak A

Sebagaimana bapak A menjelaskan:

“Awalnya jadi aku handak mahumai ampun abah idah tu kan ku lihat tanahnya tu puang kadada yang mahumainya, jadi ku takuni ae lawan sidinnya, tanah pian tu kadada yang mahumainya kah jarku, mun kada aku nah yang mahumainya, kena hasilnya dibagi jarku. Ujar sidin ayuja daripada kada dihumai kan, jadi ku serah akan ae lawan situ ujarnya. Oleh aku kadada baisi tanah sorangan, jadi aku handak mahumai tanah sidin gasan memenuhi kebutuhan keluarga kan, nambah penghasilan. Kada tapi tahu mun *mukhabarah* dalam ekonomi Islam tu, kita kan menurut

orang haja, sesuai kesepakatan kita haja handak kayak apa kaitu nah, yang penting sama-sama setuju kan.”⁷⁷

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak A sebagai salah satu petani penggarap menyatakan bahwa pada awalnya yang melatarbelakangi beliau ingin menggarap lahan milik pemilik tanah karena beliau melihat tanah tersebut masih kosong dan tidak dikelola oleh pemilik tanahnya, oleh karena itu beliau mendatangi pemilik tanah dan bertanya apakah tanah tersebut tidak ada yang mengelolanya, jika tidak ada maka saya yang akan mengelolanya kemudian hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan. Lalu pemilik tanah menjawab baiklah daripada tidak ada yang menggarap tanahnya, jadi ku serahkan kepadamu kata pemilik tanah. Kemudian beliau menjelaskan kalau beliau kurang mengetahui *mukhabarah* dalam ekonomi Islam, mereka mempraktikkannya sesuai dengan kesepakatan bersama saja, yang penting sama-sama menyetujuinya.

2) Bapak AK

Sebagaimana bapak AK menjelaskan:

“Pemilik tanahnya yang menawarkan ke aku menggawi menggarap tanahnya, oleh sidin tu sudah tuha, kada tapi mampu lagi menggawi sorangan, jadi mau ja aku menggawinya sepalih, ibarat membantu sidin jua mahumai lahan sidin, ada ja pank aku baisi lahan gasan bahuma ni tapi sadikitannya, sekitar 15 borongan ja, jadi bersedia ja menggarap tanah ampun orang ni, supaya memperbanyak persawahanku ni, jadi banyak jua penghasilan yang ku dapat, kira-kira setahunan sudah menggawi tanah sidin ni,

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak A di Kelurahan Palingkau Lama, Jum’at, 29-03-2019.

amun jadi petani sudah 6 tahunan. Kada tapi tahu pang *mukhabarah* tu, perjanjianannya disesuai akan dengan kahandak kita ja atau sesuai dengan kesepakatan.⁷⁸

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak AK sebagai salah satu petani penggarap menyatakan bahwa pemilik tanah yang menawarkan dan meminta lahannya untuk digarap oleh beliau, karena pemilik tanahnya sudah tua, kurang mampu bertani sendiri, jadi beliau bersedia untuk menggarap lahan milik pemilik tanah tersebut, ibarat membantu pemilik tanah mengelola lahannya tersebut. Beliau juga mempunyai lahan sendiri untuk digarap tetapi hanya sedikit, sekitar 15 borongan saja, jadi beliau bersedia untuk menggarap lahan milik pemilik tanah untuk memperbanyak persawahan beliau dan untuk memperbanyak penghasilannya, dan menggarap tanah milik pemilik tanah sudah sekitar 1 tahun, sedangkan menjadi petani sudah sekitar 6 tahun. Beliau kemudian menjelaskan kalau beliau kurang mengetahui *mukhabarah* dalam ekonomi Islam, perjanjian yang beliau lakukan disesuaikan dengan keinginan kedua belah pihak atau disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

3) Bapak J

Sebagaimana bapak J menjelaskan:

“Aku kan kadada pekerjaan, pekerjaan tu ada ae tapi sampingan ja, mana kadada baisi tanah jua, jadi menggarap

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak AK di Kelurahan Palingkau Lama, Kamis, 28-03-2019.

tanah ampun orang ae, handak menambah hasil lah, hasil pendapatan. Kada tapi tahu pang *mukhabarah* tu”⁷⁹

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak J sebagai salah satu petani penggarap menyatakan bahwa beliau tidak memiliki pekerjaan tetap, kemudian beliau menjelaskan kalau beliau hanya memiliki pekerjaan sampingan saja, dan beliau tidak memiliki tanah untuk bertani, jadi beliau menggarap tanah milik orang lain untuk menambah penghasilan atau pendapatan beliau. kemudian beliau menjelaskan kalau beliau kurang mengetahui *mukhabarah* dalam ekonomi Islam.”

4) Bapak R

Sebagaimana bapak R menjelaskan:

“Pemilik tanahnya yang menawari aku, jadi aku mau menggawi tanah tu, oleh aku ni kekurangan tanah lah istilahnya, tanah ampun saurang kadada nang kawa digawi. Amun tanah tu ada haja pang, cuman kada kawa digawi nah kaitu, nang kawa digawi tu ampun kami tu sekitar 20 borongan ja, hitungannya tu kurang lahan jadi handak membanyaki lahan yang digarap kaitu, banyak jua kena hasilnya. Kurang tahu pang *mukhabarah*, kami menyambatnya sewa sini atau bagi hasil lah istilahnya, pembagiannya menurut kesepakatan jua yang penting sama pada setuju kaitu ibaratnya.”⁸⁰

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak R sebagai salah satu petani penggarap menyatakan bahwa pemilik tanah yang menawari beliau untuk menggarap tanahnya, alasan beliau bersedia untuk menggarap tanah tersebut karena beliau kekurangan tanah

⁷⁹ Wawancara dengan Bapak J di Kelurahan Palingkau Lama, Jum'at, 12-04-2019.

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak R di Kelurahan Palingkau Lama, Kamis, 11-04-2019.

atau lahan pertanian yang bisa digarap. Beliau menjelaskan kalau beliau mempunyai tanah, tetapi hanya sedikit yang bisa digarap, yaitu sekitar 20 borongan saja, kata beliau ibaratkan kekurangan lahan, jadi beliau ingin menambah lahan pertanian untuk digarap agar memperbanyak lahan yang bisa beliau garap dan untuk memperbanyak hasil pendapatan beliau. Beliau kemudian menjelaskan bahwa beliau kurang tahu mengenai *mukhabarah* atau bagi hasil dalam ekonomi Islam, beliau biasa menyebutnya sewa atau bagi hasil, dan pembagiannya menurut kesepakatan bersama, dan yang penting sudah sama-sama setuju menurut beliau.

5) Bapak F

Sebagaimana bapak F menjelaskan:

“Hihih aku yang mendatangi nang ampun tanahnya, saurang yang handak menggarap, handak kayak orang jua tu bahuma, cuman kadada lahan pertanian, jadi minjam tanah orang ae gasan bahuma, manyewa sambatannya. Pas sidin ni tanahnya nganggur lah istilahnya, jadi saurang ae yang memakai tanahnya ni gasan digarap. Kena hasilnya dibagi bila sudah dikatam. Kada tapi tahu, inya menurut kesepakatan haja kan”⁸¹

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak F sebagai salah satu petani penggarap menyatakan bahwa beliau yang terlebih dahulu mendatangi pemilik tanahnya, beliau yang ingin menggarap lahan pertanian, ingin seperti kebanyakan orang, tetapi tidak mempunyai lahan pertanian untuk digarap, jadi beliau meminjam tanah milik orang lain untuk digarap, dan kebetulan

⁸¹ Wawancara dengan Bapak F di Kelurahan Palingkau Lama, Jum’at, 29-03-2019.

lahan milik pemilik tanah tidak ada yang menggarapnya, jadi beliau bersedia untuk menggarap lahan tersebut. Kemudian hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak ketika sudah panen. Kemudian beliau menjelaskan kalau beliau kurang tahu bagi hasil dalam ekonomi Islam, perjanjiannya menurut kesepakatan saja.

2. Praktik *mukhabarah* pada pertanian padi di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas

a. Pemilik Tanah

Hasil wawancara dengan Pemilik Tanah berdasarkan rumusan masalah kedua yaitu sebagai berikut:

1) Bapak S

Sebagaimana Bapak S menjelaskan:

“Pertamanya si penggarap yang mendatangi aku, ujarnya siapa yang menggarap tanah ikam jarnya, jarku kadada ae, amun kadada ae kena aku yang menggawinya jarnya, jarku gawi haja. Masalah nang pupuk segala macam tanggung jawab situ nang menggawi jarku mun kaitu gawi haja han berarti setuju sama setuju sudah, secara lisan ja. Mulai penggarapan, penyemaian, tanam, pupuk, panen, semuanya itu ditanggung oleh penggawi. Bibitnya tergantung si penggarap, jadi kita kada tahu, artinya bibit semuanya si penggarap, pas panen mengatamnya diserahkan lawan penggarapnya. Setelah selesai panen artinya sudah barasih, hanyar dibagi hasilnya, kaitu na ae. Hasilnya misalnya 1 borongan dapat 4 atau 5 blek karena tanahnya kada tapi anu jua tuh, jadi sablek gasan aku han, tasarah ae hasilnya dapatnya, misalnya lebih dari 5 blek dalam 1 borongan tetap ae sablek gasanku. Itu adil ja na ae, karena setuju sama setuju sudah, soalnya kada memberatkan si penggawi han kayaitu. Misalnya gagal panen, draw, kadada yang jadi apa-apa, tapi kadada yang tahutang atau apa, hasilnya dibagi 2, misalnya kulihi 10 blek ja jadi sama-sama 5 blek saurang, ya sama separo bila kada mencapai bayar sewa tadi. Perjanjiannya bisa diubah bila hasilnya kada sesuai.

Misalnya ni lah tanah yang digarapnya kan 20 borongan, bila dapatnya 20 blek dalam 20 borongan, kan bila saborongan sablek gasan pemilik tanah, bila dapat 20 blek ja dalam 20 borongan, berarti inya bila membayar lawan aku, habis ae, jadi supaya adil hasilnya tu dibagi 2, bila lebih daripada yang biasa didapat, tetap ae pemilik tanah dapat sablek dalam 1 borongan. Ikhlas ae itu na ae, itu perjanjian bersama sudah, lain misalnya kulihi 10 blek ja, gasan pemilik tanah kan 20 blek, bila si ampun tanah ma ambil 10 blekkan, kada dapat bagian si penggarapnya, nah itu kada adil gasan si penggarapnya. Bilanya dibagi 2, 5 blek saurang adil, berarti ikhlas sama ikhlas tu sudah, si pemilik tanah kada memberatkan si penggarap, yang si penggarap kada mengecewakan ampun tanah jua.”⁸²

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bapak S sebagai salah satu pemilik tanah menyatakan bahwa awal mulanya si petani penggarap yang mendatangi beliau untuk bekerja sama, biaya penggarapan dari awal sampai akhir ditanggung oleh petani penggarap dan jenis bibit padi ditentukan oleh si penggarap. Ketika panen telah tiba, semuanya diserahkan kepada petani penggarap, setelah selesai panen baru dibagi hasilnya, misalnya dalam 1 borongan mendapat 5 blek, jadi 1 blek untuk pemilik tanah dan 4 blek untuk petani penggarap. Misalnya dapat lebih dari 5 blek dalam 1 borongan, pemilik tanah tetap mendapatkan 1 blek dan petani penggarap mendapat sisanya. Jika terjadi gagal panen atau hasilnya kurang dari yang seharusnya untuk pemilik tanah, maka pembagian hasilnya dibagi 2, jadi perjanjiannya bisa dirubah jika hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Misalnya dalam 20 borongan, petani penggarap hanya mendapatkan 20 blek saja, jika

⁸² Wawancara dengan Bapak S di Kelurahan Palingkau Lama, Kamis, 28-03-2019.

pemilik tanah tetap mendapatkan bagiannya yang seharusnya yaitu 20 blek dalam 20 borongan, maka petani penggarap tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, hasilnya dibagi 2 yaitu 10 blek untuk pemilik tanah dan 10 blek untuk petani penggarap, agar sama-sama ikhlas dan adil, tidak memberatkan satu sama lain.

2) Bapak H.I

Sebagaimana Bapak H.I menjelaskan:

“Awalnya aku mendatangi penggarapnya ni yang mahumai tanahku, jarku sangguplah ikam mahumai tanahku katiganya jarku, jarnya kada sanggup sabuting haja sanggupnya, oleh inya ada jua baisi tanah pahumaan yang lagi dihumainya jua, jadi sabuting tanah ja yang digarapnya tu ampunku, dengan perjanjian dibagi 3, 2 gasan penggarapnya, 1 gasan aku, ayuja jar penggarapnya aku yang menggawinya jarnya. Setuju sama setuju sudah, kada pakai hitam di atas putih, secara lisan ja tu, percaya haja sudah kan. Yang digarapnya tu sekitar 25 borongan lah. Jangka waktunya sampai panen, bila sudah panen mun penggarapnya masih mau menggarap tanah tu, lanjut ae lagi, mun kada ya kada ae. Pembersihan lahannya sudah barasih, bakas aku jua yang mahumai sebelumnya, tinggal digarap ja lagi. Kalo yang mengadakan bibit segala macam inya sorangan, aku yang menyediakan tanahnya haja, biaya yang lainnya inya jua yang mengadakan, jenis bibitnya tasarah inya ae, aku maumpati haja, segala mengatamnya inya jua kan. Habis dikatam hanyar dibagi hasilnya tu, dibagi 3 barasih, 2 gasan penggarapnya, 1 gasan aku, misalnya dapatnya 150 blek, jadi 50 blek gasan aku, 100 blek gasan penggarapnya. Bila gagal panen parai, sama-sama parai, sama-sama kadada dapat hasil. Tapi misalnya dapatnya sedikit, tetap ja dibagi 3, dapat 3 blek ibaratnya, 2 blek gasan inya, 1 blek gasanku, sa apa ada hasilnya tetap ja dibagi 3, itu amunnya ada hasil, amunnya kadada hasil apa ada kadada yang dibagi-bagi ae, sama-sama adil ibaratnya tu kan, sudah sesuai kesepakatan, sama-sama sanang haja. Ikhlas ja, suka sama suka sudah perjanjiannya kayaitu, sama pada tenang sudah.”⁸³

⁸³ Wawancara dengan Bapak H.I di Kelurahan Palingkau Lama, Kamis, 28-03-2019.

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bapak H. I sebagai salah satu pemilik tanah menyatakan bahwa pada awalnya beliau yang mendatangi petani penggarap untuk mengelola tanah beliau, dan beliau bertanya kepada petani penggarap apakah petani penggarap sanggup untuk mengelola tanah milik beliau semuanya, dan petani penggarap menjawab tidak sanggup, hanya mampu menggarap sebagian tanah saja, karena petani penggarap juga mengelola tanahnya sendiri, jadi hanya sebagian tanah saja milik beliau yang digarap petani penggarapnya. Dengan perjanjian dibagi 3, $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah, dan penggarap menyetujui perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan, atas dasar saling percaya. Tanah yang digarap sekitar 25 borongan. Jangka waktu perjanjiannya sampai selesai panen, jika petani penggarap masih bersedia untuk menggarap tanah tersebut maka perjanjian akan dilanjutkan kembali. Pembersihan lahan sudah ditanggung oleh pemilik tanah. Sedangkan yang menyediakan bibit dan biaya yang lainnya adalah petani penggarap, dan beliau menyediakan tanahnya saja. Jenis bibit diserahkan kepada petani penggarap, ketika panen juga dilakukan oleh petani penggarap. Setelah selesai panen, baru dilakukan pembagian hasilnya, yaitu dibagi $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap, misalnya dapat 150 blek, jadi 50 blek untuk pemilik tanah dan 100 blek untuk petani

penggarap. Ketika terjadi gagal panen, sama-sama ditanggung kedua belah pihak. Seandainya hasil yang didapat sedikit, tetap dibagi $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap, sesuai hasil yang didapatkan. Menurut beliau itu sama-sama adil karena sudah disepakati bersama, dan sudah sama-sama ikhlas.

3) Ibu R

Sebagaimana Ibu R menjelaskan:

“Pada awalnya penggarap yang dahulu handak, jika ibarat nang penggawi tu nah yang handak, aku ni bersedia haja, ibaratnya tu kalo babarang haja, timbang-timbang tanah ngintu kada diapa-apai, tampulu ada yang hakun mahumai kan lebih bagus. Perjanjiannya 3 tahun minimal mahumai, mun handak lebih daripada itu tasarah ae, tergantung kesepakatan ae lagi, asal jangan kurang pada 3 tahun. Biaya pembersihan ditanggung penggarapnya, segala bibit, pupuknya inya yang menanggung, mun jenis bibitnya tasarah inya ae, inya yang menggawinya kan sampai penen tu. Pembagiannya tu alakadarnya haja, oleh tanahnya tu kada tapi subur, mana jauh di subarang sana, misalnya 1 blek 1 borongan, kayak itu ae, misalnya sahektar dapatnya 100 blek, 15 blek gasan ampun tanahnya. Hitungannya 15% daripada hasil lah ibaratnya, misalnya sadikit dapatnya tetap ae 15% jua, kita nang ampun tanah ni kadang-kadang takananya bagus tu hasilnya, bagus jua dapatnya gasan kita, kadang-kadang 100, 150 dapatnya atau lebih, bilanya lebih tu lebih jua membari gasan yang ampun tanahnya. Bila gagal panen, gagal jua, ya nang ngaran panen tu kada menentu lah hasilnya berapa, sesuai akan kesepakatan ae lagi kayakapa. Adil inya, bilanya sudah sepakat sudah kisahny, sama pada ikhlas, kada memberat akan satu sama lain jua tu.”⁸⁴

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Ibu R sebagai salah satu pemilik tanah menyatakan bahwa pada awalnya petani penggarap yang ingin menggarap tanah beliau atau yang meminta

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu R di Kelurahan Palingkau Lama, Jum’at, 05-04-2019.

untuk menggarap tanah beliau, dan beliau bersedia menyerahkan tanahnya tersebut untuk dikelola, daripada tanah tersebut tidak ada yang mengelola, selagi ada yang ingin menggarapnya lebih baik kata beliau. Perjanjiannya minimal 3 tahun dalam menggarap tanah tersebut, perjanjiannya bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama, tetapi tidak boleh kurang dari 3 tahun. Biaya pembersihan lahan ditanggung oleh petani penggarap, biaya yang lainnya seperti bibit, pupuk dan lain-lain ditanggung oleh petani penggarap, dan jenis bibit diserahkan kepada petani penggarap, ketika panen juga diserahkan kepada petani penggarap. Pembagiannya dilakukan seadanya karena tanahnya kurang subur dan lokasinya yang jauh, dalam 1 borongan pemilik tanah mendapatkan 1 blek. Misalnya dalam 1 hektar tanah mendapat 100 blek, jadi 15 blek untuk pemilik tanah, artinya 15% daripada hasil untuk pemilik tanahnya. Jika pendapatannya sedikit, pemilik tanah tetap mendapatkan 15% dan jika hasil panen lebih bagus dari yang biasanya, maka pemilik tanah juga tetap mendapatkan 15% dari hasil panen tersebut. Hasil panen yang di dapat biasanya 100 blek, 150 blek, atau lebih daripada itu. Jika terjadi gagal panen ditanggung kedua belah pihak dan disesuaikan kembali dengan kesepakatan bersama. Menurut beliau itu adil jika sudah sama-sama sepakat antara kedua belah pihak dan sama-sama ikhlas karena tidak memberatkan satu sama lain.

4) Bapak K

Sebagaimana Bapak K menjelaskan:

“Awalnya aku handak menukar tanah pahumaan, jadi ku cari orang yang bisa menggawinya dulu, mun ada yang hakun, ku tukari tanah tu, pas tabarungan ada yang hakun, kutukari ae tanahnya tu. Lalu ba atur ae lagi kayapa pembagiannya, setuju sudah tu, menggawinya ae lagi. Pembersihan lahan ditanggung penggarapnya hitungannya, biaya dengan tenaga sidin jua yang menanggung, aku di sini menyediakan tanahnya ja tu. Jenis bibitnya tasarah sidin ae, aku maumpati haja kaitu nah. Pas sudah panen, sidin yang menggawinya. Pembagiannya tu saborongan sablek gasan pemilik tanahnya ni, tasarah haja dapatnya berapa, nang nyata dapat sablek saborongan tu. Misalnya tanahnya 40 borongan kalo, jadi 40 blek gasan kita. Misalnya dapatnya sedikit atau gagal panen bisa ba atur ba asa pulang pembagiannya, mun tatap kaitu jua bagi hasilnya kasian penggarapnya jua kan, jadi ya ba atur ba asa ae pulang pembagiannya ni supaya sama-sama adil kaitu nah, sama pada ikhlas jua kan.”⁸⁵

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak K sebagai salah satu pemilik tanah menyatakan bahwa awal mulanya beliau ingin membeli tanah atau lahan pertanian, sebelum itu beliau mencari orang yang bisa menggarap tanah pertanian tersebut terlebih dahulu. Jika ada yang bersedia, maka beliau akan membeli tanah tersebut. Lalu dibuatlah sebuah kesepakatan dalam pembagian hasilnya jika kedua belah pihak sudah setuju, maka mulailah penggarapan tanah tersebut. Kemudian beliau menjelaskan, pembersihan lahan ditanggung oleh petani penggarap dan biaya serta tenaga selama menggarap juga ditanggung oleh petani penggarap, beliau hanya menyediakan tanahnya saja untuk

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak K di Kelurahan Palingkau Lama, Kamis, 11-04-2019.

digarap. Jenis bibit diserahkan kepada si petani penggarap dan ketika panen juga diserahkan kepada petani penggarap yang melakukannya. Pembagiannya dalam 1 borongan, 1 blek untuk pemilik tanah. Terserah pendapatannya berapa, yang pasti dalam 1 borongan, pemilik tanah mendapatkan 1 blek, jelas beliau. Misalkan tanahnya sekitar 40 borongan, jadi pemilik tanah mendapatkan 40 blek. Jika pendapatannya sedikit atau gagal panen, maka akan diatur ulang kembali pembagian hasil tersebut. Jika pembagiannya tetap seperti yang awal ketika terjadi gagal panen, maka beliau merasa kasihan terhadap si petani penggarap. Jadi pembagian diatur kembali sesuai kesepakatan bersama, agar keduanya sama-sama merasa adil dan tidak ada yang merasa dirugikan kata beliau, dan juga sama-sama merasa ikhlas.

5) Bapak AR

Sebagaimana Bapak AR menjelaskan:

“Ia pang si R menakuni pahumaan tu kada dihumai lagi kah jarnya, bila kada aku ae mahumainya jar, hiih ae jarku mun ikam handak humai ha, pas ae aku kada kawa jua mahumainya oleh aku aur bagawi manyervis, jadi ku serah akan ae lawan inya yang menggawinya nih, termasuk biaya segala macam bibitnya inya samunyaan yang menyediakan, tasarah haja jenis bibitnya tu, lawan mangatamnya inya jua, aku mainjami tanahnya ja, yang lainnya inya, sudah ae. Pas bagi hasil dalam saborongan tu sablek gasan kita kan, inya tanahnya satangah hektar, biasanya tu sakitar 15 blek lah gasan kita, tergantung hasilnya bilanya takana bagus, nyata 15 blek tu hulu. Bilanya rusak, bisa haja kurang inya manjulungi tergantung hasilnya ae. Kita ni kurang labih haja, yang penting sama-sama ikhlas ba akuran ja, sama-

sama kada memberat akan satu sama lain han, adil ae sudah sama-sama sepakat.”⁸⁶

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak AR sebagai salah satu pemilik tanah menyatakan bahwa si petani penggarap bertanya kepada beliau mengenai tanah tersebut jika tidak ada yang menggarapnya maka petani penggarap yang ingin menggarap tanah tersebut kata beliau, kemudian beliau menyetujuinya karena beliau sibuk kerja menjadi tukang servis, sehingga tidak bisa mengelola tanah pertaniannya itu. Jadi beliau serahkan kepada petani penggarap untuk mengelolanya, termasuk semua biaya disediakan oleh petani penggarap, jenis bibit terserah si petani penggarap yang menyediakan, dan ketika panen juga dikerjakan oleh petani penggarap. Beliau hanya menyediakan tanah pertaniannya saja. Ketika bagi hasil, pembagiannya dalam 1 borongan beliau mendapatkan 1 blek, tanahnya sekitar setengah hektar dan biasanya pemilik tanah mendapatkan sekitar 15 blek tergantung hasil yang didapat apabila bagus, yang pasti pemilik tanah mendapatkan sekitar 15 blek. Apabila hasilnya kurang bagus atau gagal panen, hasil untuk pemilik tanah bisa dikurangi tergantung hasil yang didapat. Kemudian beliau mengatakan yang penting sudah sama-sama ikhlas dan tidak memberatkan satu sama lain, serta adil karena sudah disepakati kedua belah pihak.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak AR di Kelurahan Palingkau Lama, Sabtu, 30-03-2019.

b. Petani Penggarap

Hasil wawancara dengan Pemilik Tanah berdasarkan rumusan masalah kedua yaitu sebagai berikut:

1) Bapak A

Sebagaimana Bapak A menjelaskan:

“Pamulaan kaini, aku yang mendatangi pemilik tanahnya, handak meminta menggarap tanahnya kan. Yang dipanderi masalah sewa kan berapa, seandainya gagal panen kayapa, kayak itu nah, inya janji kita badua, misalnya berhasil kan dalam 1 borongan, 1 blek lah gasan pemilik tanahnya, misalnya gagal kan bisa diatur kembali kayak itu nah, dalam artian itu kan dibagi 2 bisa. Misalnya setuju sama setuju sudah, mulai ae lagi menggawi, secara lisan ja perjanjiannya tu. Pembersihan lahan tu kita yang menanggungnya kan, biaya yang lainnya kita jua yang menyediakannya, yang punya tanah kan yang menyediakan lahan haja, jenis bibitnya tasarah kita haja kan, artinya apa haja yang dibawa kayaitu nah. Hiih pas mengatam kita sorangan yang mengatamnya, artinya ampun tanah tahu bersih ja di rumah sekian yang bahasil. Pembagiannya ya tadi pang misalnya 1 borongan sablek gasan pemilik tanahnya kan atau seandainya dapat 100 blek ke atas, itu 25 blek gasan pemilik tanahnya, bila seandainya kada mencapai, bisa diatur kembali kan misal 10 blek kah, 15 blek kah kayaitu nah yang jadi hasil, misalnya gagal panen kan bagi 2 bisa, adil pang tu, ikhlas inya kan sama pada kesepakatan kedua belah pihak, kada kita yang menentukan sorangan kada, ada pandernya badua kan.”⁸⁷

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak A sebagai salah satu petani penggarap menyatakan bahwa awal mulanya, petani penggarap yang mendatangi pemilik tanahnya untuk menggarap tanah tersebut. Yang diperbincangkan yaitu masalah pembagian hasil panen dan bagaimana pembagiannya jika terjadi

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak A di Kelurahan Palingkau Lama, Jum’at, 29-03-2019.

gagal panen, itu menurut perjanjian kedua belah pihak, jika berhasil atau pendapatannya bagus maka pemilik tanah mendapatkan 1 blek dalam 1 borongan, dan jika terjadi gagal panen perjanjian bisa diatur kembali sesuai dengan kesepakatan mereka berdua, misalnya bisa dibagi 2 antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Jika kedua belah pihak sudah setuju sama setuju, maka petani penggarap sudah bisa memulai penggarapan tanah tersebut, dan perjanjiannya secara lisan. Pembersihan lahan ditanggung oleh petani penggarap, biaya yang lainnya juga ditanggung oleh petani penggarap, pemilik tanah hanya menyediakan tanahnya saja, jenis bibit diserahkan kepada petani penggarap, dan pada saat panen juga dilakukan oleh petani penggarap, pemilik tanah tau hasil bersihnya saja. Pembagian hasilnya yaitu 1 blek dalam 1 borongan untuk pemilik tanah, atau misalnya hasil panen yang didapat oleh petani penggarap yaitu 100 blek atau lebih, maka pemilik tanah mendapat 25 blek, dan jika seandainya hasil panen tidak mencapai 100 blek, perjanjian bisa diatur kembali misalnya pemilik tanah hanya mendapatkan 10 blek atau 15 blek. Jika terjadi gagal panen, pembagian hasil padinya bisa dibagi 2 sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Menurut beliau, hal tersebut adil dan sama-sama ikhlas karena sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak ditentukan salah satu pihak saja.

2) Bapak AK

Sebagaimana Bapak AK menjelaskan:

“Pertamanya kan pemilik tanahnya menawarkan minta garap akan lahan pertaniannya ni, aku ni bersedia ja, ujarnya sangguplah aku ni menggarap tanah ampunya semuanya, aku kada sanggup jarku mun menggarap semuanya, oleh aku ni menggarap ampunku sorangan jua sesambilan, kebanyakan yang ku garap kena ngalih, jadi aku menggarap yang sekitar 25 borongan tu ja. Perjanjiannya tu secara lisan ja, kada tertulis. Dengan pembagian hasilnya dibagi 3 jar sidin, 2 gasanku, 1 gasan sidin yang baisi tanahnya. Kalo masalah pembersihan lahannya tu sudah bersih badahulu lahannya, bekas sidin menggarap jua tu sebelumnya tu, oleh sidin kada mampu lagi menggawinya, makanya aku yang melanjutkannya. Masalah biaya dan tenaga kerja di tanggung oleh penggawilah istilahnya, jenis bibit yang ditanam tasarah ae, aku ae yang menentukannya, aku jua yang mengatamnya. Pembagian hasilnya ya kayak jarku tadi, anggapannya 1/3 gasan pemilik tanah, 2/3 gasan penggarapnya, bila banyak hasilnya banyak jua memberinya ke pemilik tanah, bila sedikit hasilnya sedikit jua gasan pemilik tanahnya. Tapi tetap ja dibagi 3, se apa ada hasil ja tu kan. Adil ae tu sama pada akur, setuju sama setuju kan, ikhlas ja jua sudah jadi kesepakatan bersama kan.”⁸⁸

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak AK sebagai salah satu petani penggarap menyatakan bahwa awal mulanya pemilik tanah yang menawarkan dan meminta beliau untuk menggarap lahannya tersebut, dan beliau bersedia untuk menggarapnya. Pemilik tanah menawarkan kepada beliau untuk menggarap semua lahannya, tetapi beliau hanya sanggup menggarap sebagian lahan saja yaitu sekitar 25 borongan saja, karena beliau juga memiliki lahan sendiri untuk digarap.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak AK di Kelurahan Palingkau Lama, Kamis, 28-03-2019.

Perjanjiannya dilakukan secara lisan dan tidak tertulis. Dengan pembagian hasilnya yaitu dibagi 3 artinya $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanahnya. Bapak AK menuturkan bahwa pembersihan lahan sudah ditanggung oleh pemilik tanah, karena lahan tersebut sudah pernah digarap sebelumnya oleh pemilik tanah, pemilik tanah sudah tidak mampu lagi menggarap lahan tersebut, jadi bapak AK yang melanjutkan menggarap lahan tersebut. Beliau juga menyatakan bahwa biaya dan tenaga kerja ditanggung oleh petani penggarap, jenis bibit yang ditanam diserahkan kepada petani penggarap dan ketika panen juga dilakukan oleh petani penggarap. Beliau menjelaskan bahwa pembagian hasilnya yaitu $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap, jika hasil yang didapatkan banyak, maka banyak juga bagian untuk pemilik tanahnya dan jika hasilnya sedikit maka sedikit pula bagian untuk pemilik tanahnya. Tetapi pembagiannya tetap dibagi $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarapnya, sesuai dengan pengasilan yang didapat. Beliau berpendapat kalau hal tersebut sudah adil karena sudah setuju sama setuju, dan sama-sama ikhlas karena sudah sesuai dengan kesepakatan.

3) Bapak J

Sebagaimana Bapak J menjelaskan:

“Awal-awalnya kan aku yang handak menggawi tanah ampun sidin tu, aku yang mainjamnya kayaitu nah, lawan

Perjanjiannya sebelum 3 tahun kada kawa diambil tanah tu, ada batasan misalnya kita membuka tanah ampun orang tu nah minimalnya tu 3 tahun, lewat pada 3 tahun tu tasarahai diambil orang kah macamanakah, misalnya handak diperpanjang boleh jua, handak pabila kah diambilnya, sesuai kesepakatan ae, cuman sebelum 3 tahun tu kada boleh diambil, perjanjiannya kayaitu. Secara lisan ja tu perjanjiannya. Biaya pembersihannya tu menanggung aku sorangan haja, nintu kadada lagi urusannya, kita mainjam tanah ae lagi, amunnya jar ampun tanah hiih, kita ae lagi segala bibitnya, dan yang lainnya yang mengada akan kita. Amun jenis bibitnya tu yang menentukan kita ae, kada ditentukan kedua belah pihak, salah satu pihak haja, yang tukang garap pank. Menggarapnya kita jua. Pembagiannya bisa 1 blek dalam 1 borongan, kalo 1 hektar tu na 35 borongan kalo, berarti 35 blek dalam 1 hektar hasil ampun tanah bila hasilnya baik, dalam 1 borongan biasanya 5-6 blek lah dapatnya amun orang harat rajin, amun tanahnya bagus ibaratnya tu, ini kan tergantung tanahnya baik kadanya, amun tanah yang ngini kada tapi baik kada, paling harat 5 blek dalam 1 borongan, berarti hitungan 1 blek gasan orang ampun tanah nih. Perjanjiannya kayak itu, tapi rajin ada pulang pandernya misalnya hasil dari 1 tahun kada sesuai lawan perkiraan, kena ada ae pandernya kedua belah pihak. Misalnya dapatnya dalam 1 hektar tu 25 blek, gagal panen kalo tu hitungannya, membarinya tu paling 3 blek atau 5 blek, asal ada gasan yang ampun tanah kayaitu na, sama pada merasai hasilnya tu. Adil atau kadanya di situ pang kena ada timbang rasa, sesuai keadaan penghasilan, sesuai kesepakatan haja tu jadi adil ae. Hiih sama pada ikhlas pang tergantung kita menjulungi ae. Misalnya gagal panen pas takana rusak kulihan 20 blek ja misalnya, dijulungi gasan yang ampun tanah, Kada adil gasan kita, han kaitu hitungannya, jadi kena timbul timbang rasa pulang, ayuha barangae seadanya sama pada merasai hasilnya ni, jadi ikhlas ae tu sudah, disepakati bersama jua kan”⁸⁹

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak J sebagai salah satu petani penggarap menyatakan bahwa awal mulanya beliau yang ingin menggarap tanah milik pemilik tanahnya, dengan

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak J di Kelurahan Palingkau Lama, Jum’at, 12-04-2019.

perjanjian jangka waktu 3 tahun, sebelum 3 tahun tanah tersebut tidak boleh diambil oleh pemilik tanahnya, jika lewat dari 3 tahun, tanah tersebut bisa diambil atau perjanjian penggarapan tanah tersebut bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama. Perjanjiannya dilakukan secara lisan. Beliau menyatakan bahwa biaya pembersihan lahan ditanggung oleh beliau sendiri, biaya penggarapan termasuk bibit dan yang lainnya ditanggung oleh petani penggarap, jenis bibitnya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, hanya salah satu pihak saja yaitu petani penggarap, ketika panen juga dilakukan oleh petani penggarapnya. Pembagian hasilnya yaitu 1 blek dalam 1 borongan untuk pemilik tanah. Beliau menerangkan jika dalam 1 hektar terdapat 35 borongan, maka pemilik tanah mendapatkan 35 blek dalam 1 hektar jika hasilnya bagus, dalam 1 borongan biasanya mendapat 5-6 blek jika tanahnya subur, tergantung tanahnya bagus atau tidak. Beliau menjelaskan bahwa tanah yang beliau garap kurang subur, paling banyak hasilnya dalam 1 borongan yaitu 5 blek, jadi 1 blek untuk pemilik tanahnya dan sisanya untuk petani penggarap. Jika hasil dari 1 tahun tidak sesuai dengan yang diperkirakan, pembagiannya bisa dibicarakan lagi antara kedua belah pihak. Misalnya dalam 1 hektar hanya mendapat 25 blek, jadi bagian untuk pemilik tanah yaitu 3 blek atau 5 blek, asalkan ada bagian untuk pemilik tanah dan sama-sama merasakan hasilnya, kata beliau. Adil atau tidaknya

pembagian tersebut, di situlah nanti ada timbang rasa antara kedua belah pihak, sesuai penghasilan yang didapat nantinya dan juga sesuai dengan kesepakatan bersama, jadi bisa dikatakan adil menurut beliau dan sama-sama ikhlas. Misalnya terjadi gagal panen dan hasilnya hanya 20 blek saja, jika diserahkan semua untuk pemilik tanah, maka tidak adil untuk petani penggarap, jadi disitulah nantinya ada timbang rasa antara pemilik tanah dan petani penggarap, secara suka rela, artinya kesepakatan bisa dibicarakan kembali sesuai hasil yang didapat nantinya, jadi hal tersebut bisa dikatakan adil dan sama-sama ikhlas menurut beliau karena menurut kesepakatan bersama.

4) Bapak R

Sebagaimana Bapak R menjelaskan:

“Pemilik tanah yang badahulu menawari tanahnya nih gasan digarap, oleh inya sibuk badagang. Perjanjiannya tu ibaratnya sewa sablek saborongan kaitu nah. Biaya pembersihan lahan tu ditanggung saurang ae pang, ampun tanah ni tahu barasih kaitu nah, saurang ae hitungannya bibit segalanya ditanggung saurang yang menggawi, nang ampun tanah tu kadada pakai biaya kadada, menyediakan lahannya haja hitungannya. Jenis bibitnya terserah kita ae yang menentukan. Mengatamnya kita jua, ampun tanah tahu barasih haja. Pembagiannya sablek dalam saborongan tu gasan ampun tanah, sisanya gasan kita. Misalnya 30 borongan dapatnya 200 blek misalnya, jadi gasan ampun tanah 30 blek, dibagi $\frac{1}{6}$ hitungannya saborongan tu. Bila gagal panen atau kurang dari perkiraan lah istilahnya dapatnya tu, bisa berubah pembagiannya tu, bisa dibagi $\frac{1}{5}$ bisa atau $\frac{1}{4}$ bisa jua, ada sedikit haja pang dipotong kaitu na. Tapi disepakati badua jua, kada saurang yang menentukan bagiannya sorangan, adil ae ibarat setuju sama setuju kan, menurut kesepakatan bersama sudah. Misalnya dipotong kaini nah kayapa misalnya dipotong 5 blek dari

yang awal membari gasan ampun tanah hakun lah, misalnya ampun tanahnya hakun, akur kan tu sudah, berarti ikhlas haja kaitu nah, baikhlasan tu sudah hitungannya.⁹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak R sebagai salah satu petani penggarap menyatakan bahwa Pemilik tanah yang terlebih dahulu menawarkan kepada beliau untuk menggarap tanahnya, dikarenakan si pemilik tanah sibuk dengan pekerjaan lain. Perjanjiannya seperti sewa yaitu 1 blek dalam 1 borongan untuk pemilik tanah. Biaya pembersihan lahan ditanggung oleh beliau sendiri dan biaya lainnya seperti bibit dan lain-lain ditanggung oleh beliau juga. Pemilik tanah tidak mengeluarkan biaya dan hanya menyediakan lahannya saja. Jenis bibitnya tergantung si petani penggarap yang menyediakannya, serta pada saat panen juga dilakukan oleh petani penggarapnya. Pembagian hasilnya yaitu dalam 1 borongan, pemilik tanah mendapatkan 1 blek dan sisanya dalam untuk petani penggarapnya. Misalnya jika dalam 30 borongan mendapat sekitar 200 blek, jadi untuk pemilik tanah yaitu 30 blek, artinya dibagi $\frac{1}{6}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{5}{6}$ untuk petani penggarap dalam 1 borongan. Jika terjadi gagal panen atau hasilnya kurang dari perkiraan sebelumnya, maka pembagiannya bisa berubah, misalnya bisa dibagi $\frac{1}{5}$ atau $\frac{1}{4}$ sesuai hasil yang didapat, menurut kesepakatan kedua belah pihak, tidak ditentukan salah satu pihak saja. Beliau mengatakan kalau hal

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak R di Kelurahan Palingkau Lama, Kamis, 11-04-2019.

tersebut adil karena sudah disetujui kedua belah pihak yaitu petani penggarap dan pemilik tanahnya, dan sudah disepakati bersama. Beliau kemudian menjelaskan jika pemilik tanahnya menyetujui pembagian tersebut, maka bisa dikatakan sama-sama ikhlas menurut beliau.

5) Bapak F

Sebagaimana Bapak F menjelaskan:

“Aku yang meminta menggarap tanah to. Perjanjiannya tu sablek saborongan gasan ampun tanah, pas sidin setuju, sudah sama-sama setuju, sudah ae, menggawinya ae lagi. Samunyaan biayanya penggarap yang mengadakan, hiih mulai dari pembersihan lahannya sampai mengatamnya saurang yang menggawi. Jenis bibit penggarap jua yang menentukan, tasarah kita ae, ampun tanah ni tahu barasih haja, yang nyediai tanahnya ja kan. Pembagiannya 1 blek dalam 1 borongan gasan ampun tanah, sisanya gasan saurang, inya oleh jauh pahumaannya tu, ongkos kita kesana pulang han. Tanahnya sekitar setengah hektar ja, ya kira-kira 15 borongan lah hitungannya tu, jadi gasan ampun tanahnya 15 blekan lah istilahnya dirata akan. Dalam kesepakatan sudah, jadi itu adil, sudah sama-sama menyetujui nang kayak itu. Misalnya gagal panen sadikit membari hasilnya tadi, tergantung hasilnya ja pang, bisa berubah dari kesepakatan awal bilanya sadikit dapatnya. Sama-sama baikhlasan ae oleh sudah sama-sama setuju”⁹¹

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui Bapak F sebagai salah satu petani penggarap menyatakan bahwa beliau yang meminta untuk menggarap lahan milik pemilik tanah tersebut. perjanjianannya yaitu 1 blek dalam 1 borongan untuk pemilik tanah, jika kedua belah pihak sudah sama-sama setuju, maka mulailah penggarapan lahan tersebut. Semua biayanya disediakan oleh

⁹¹ Wawancara dengan Bapak F di Kelurahan Palingkau Lama, Jum’at, 29-03-2019.

petani penggarap, mulai dari pembersihan lahan sampai panen dilakukan oleh petani penggarap dan jenis bibit juga ditentukan oleh petani penggarap, pemilik tanah hanya menyediakan tanahnya saja. Pembagian hasilnya yaitu 1 blek dalam 1 borongan untuk pemilik tanah dan sisanya untuk si petani penggarap, karena tempat lahan pertaniannya yang cukup jauh dari rumah beliau. tanahnya sekitar setengah hektar atau sekitar 15 borongan, jadi pemilik tanah mendapatkan 15 blek. Kemudian beliau menjelaskan hal tersebut adil karena sudah menjadi kesepakatan bersama, dan kedua belah pihak sama-sama menyetujuinya. Jika terjadi gagal panen, maka hasil untuk pemilik tanah juga sedikit atau kurang dari yang disepakati sebelumnya, tergantung hasil yang didapat. Perjanjian bisa berubah dari kesepakatan awal, jika hasil yang didapat sedikit dan sama-sama ikhlas karena sudah disetujui kedua belah pihak.

C. Analisis Hasil Penelitian

Penerapan sistem *mukhabarah* dalam kegiatan pertanian di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas akan peneliti uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi tiga kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *pertama*, latar belakang terjadinya kerja sama *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas. *Kedua*, praktik *mukhabarah* pada pertanian padi di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

Ketiga, tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem *mukhabarah* di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.

1. Latar belakang terjadinya kerja sama *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas

Latar belakang terjadinya kerja sama *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas, dikarenakan tidak semua petani di kelurahan Palingkau Lama memiliki lahan pertanian sendiri untuk digarap, tetapi memiliki kemampuan untuk bertani sehingga mereka menggarap lahan milik orang lain dan ada juga pemilik tanah yang tidak memiliki kemampuan dalam bertani dan tidak ada waktu dikarenakan adanya pekerjaan lain sehingga mereka tidak mampu untuk mengelola lahannya sendiri. Karena hal tersebut mereka terdorong untuk melakukan kerja sama antara pemilik tanah dengan petani penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari petani penggarap. Hal ini dilakukan agar tanah yang nganggur dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan manfaat bagi para petani di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas.

Hal ini sebagaimana Bapak S selaku pemilik tanah menjelaskan bahwa beliau mempunyai tanah di kelurahan Palingkau Lama tetapi beliau

tidak dapat mengelolanya sendiri, dikarenakan ada pekerjaan lain dan daripada tanah tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, jadi beliau menyerahkan tanahnya kepada petani penggarap untuk dikelola agar tanah tersebut dapat memberikan manfaat.

Para pemilik tanah yang lain juga memiliki alasan yang sama seperti Bapak S yaitu Bapak H.I, Ibu R, Bapak K dan Bapak A.R. yang melatarbelakangi mereka melakukan kerja sama *mukhabarah* yaitu dikarenakan adanya pekerjaan lain seperti berdagang, tidak punya waktu dan tenaga yang kurang sehingga tidak mampu lagi untuk mengelola lahannya sendiri. Oleh karena itu, pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada petani penggarap untuk dikelola atau digunakan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan manfaat, baik bagi pemilik tanah maupun petani penggarap di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten kapuas.

Sedangkan yang melatar belakangi para petani penggarap yaitu rata-rata petani penggarap di kelurahan palingkau lama tidak memiliki lahan pertanian sendiri atau lahan yang dimilikinya hanya sedikit sehingga mereka terdorong untuk melakukan kerja sama *mukhabarah* untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak A selaku petani penggarap menyatakan bahwa yang melatar belakangi beliau ingin menggarap lahan milik pemilik tanah dikarenakan beliau tidak memiliki tanah sendiri, oleh karena itu beliau ingin menggarap lahan pertanian milik

orang lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau atau menambah penghasilan sehari-hari.

Para petani penggarap yang lain juga rata-rata memiliki alasan yang sama seperti Bapak A yaitu Bapak F dan Bapak J yang melatarbelakangi mereka melakukan kerja sama *mukhabarah* adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dikarenakan tidak memiliki lahan pertanian sendiri untuk digarap sehingga mereka terdorong untuk melakukan kerja sama *mukhabarah* untuk menambah penghasilan mereka.

Ada juga beberapa petani seperti Bapak AK dan Bapak R yang memiliki lahan pertanian sendiri tetapi hanya sedikit, sehingga mereka bersedia untuk menggarap lahan milik orang lain untuk menambah penghasilannya.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak AK selaku petani penggarap yang menyatakan bahwa beliau juga mempunyai lahan sendiri untuk digarap tetapi hanya sedikit, jadi beliau bersedia untuk menggarap lahan milik pemilik tanah untuk memperbanyak persawahan yang akan digarap dan untuk memperbanyak penghasilan beliau.

Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak R selaku petani penggarap yang menjelaskan bahwa beliau ingin memperbanyak lahan pertanian yang ingin digarap sehingga beliau bersedia menggarap lahan milik orang lain untuk menambah penghasilan.

Berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya petani penggarap yang mendatangi pemilik tanah dan menawarkan diri untuk menggarap

lahan pertaniannya karena melihat sawah yang produktif namun tidak dimanfaatkan, dan terkadang pula pemilik tanah yang datang kepada petani penggarap meminta tolong agar sawahnya digarap karena sudah tidak mampu mengelola lahannya sendiri atau adanya kesibukan lain dan kondisi waktu yang kurang. Setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan entah itu atas inisiatif pemilik tanah maupun atas kehendak petani penggarap dengan tujuan agar mengadakan akad atau perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan, dan kemudian masing-masing keduanya mendapatkan bagian dari hasil tanah tersebut, maka hal tersebut sangat berarti karena terdapat manfaat yang besar baik bagi pemilik tanah maupun petani penggarap yaitu saling bertukar manfaat di antara keduanya sehingga dapat melahirkan sebuah persahabatan dan rasa saling tolong menolong. Dengan hal ini, mereka juga dapat memiliki sifat amanah (saling percaya).

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Eneng Hidayat bahwa *mukhabarah* terdapat manfaat, yaitu untuk saling tolong menolong dan memenuhi kebutuhan hidup, dengan adanya *mukhabarah*, pemilik tanah yang tidak memungkinkan mengolah tanahnya sendirian membutuhkan seorang petani untuk membantu mengolah tanahnya, begitupun petani membutuhkan pekerjaan mengolah tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dalam hal ini terdapat hubungan timbal balik di antara keduanya.⁹²

⁹² Eneng Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah, ...*, Hal. 171.

Di ketahui bahwa agama Islam membenarkan seorang muslim berusaha secara perorangan maupun bekerja sama, karena banyak usaha yang tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain, yang memungkinkan hal tersebut dapat berjalan lancar. Maka Islam mensyari'atkan bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian yaitu *mukhabarah/ muzara'ah* dan *musaqah* agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama Islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut. sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.⁹³

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”⁹⁴

Mayoritas ulama membolehkan akad bagi hasil tanaman, baik dalam bentuk *musaqah* dan *muzara'ah/ mukhabarah* secara terpisah (sendiri-sendiri) maupun bersamaan, berdasarkan hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi pernah memperkerjakan penduduk Khaibar untuk memelihara/ menanam tanaman

⁹³ QS. An-Nisa [4] : 29.

⁹⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*, ..., Hal. 83.

dengan perjanjian bagi hasil sebanyak separuh dari hasil tanaman atau buahnya. Hal ini juga diikuti oleh para sahabatnya.⁹⁵

Terkait dengan pengetahuan masyarakat tentang *mukhabarah* atau bagi hasil pertanian padi dalam Ekonomi Islam masih kurang. Rata-rata para petani di kelurahan Palingkau Lama kurang mengetahui *mukhabarah* atau bagi hasil dalam Ekonomi Islam secara teori, mereka mempraktikkannya sesuai dengan kebiasaan setempat dan menurut kesepakatan mereka sendiri. Asalkan kedua belah pihak sama-sama menyetujui perjanjian tersebut dan merasa adil.

Sebagaimana Bapak AK selaku petani penggarap yang menjelaskan kalau beliau kurang mengetahui *mukhabarah* dalam ekonomi Islam, perjanjian yang beliau lakukan disesuaikan dengan keinginan kedua belah pihak saja atau disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

Pendapat Bapak AK tersebut didukung pula oleh para pemilik tanah dan petani penggarap lain yang menjelaskan bahwa pemahaman mereka mengenai sistem kerja sama yang berlaku di kelurahan Palingkau Lama ini pada umumnya berlaku berdasarkan kebiasaan setempat atau atas inisiatif dari masyarakat sendiri, yang artinya tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam. Hal ini dianggap agar mudah disesuaikan dengan keinginan dari para pihak.

Menurut pengamatan peneliti, kerja sama yang dilakukan masyarakat kelurahan Palingkau Lama ini memiliki cara yang hampir

⁹⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, ..., Hal. 121.

sama dengan *mukhabarah* pada umumnya, yaitu para pihak saling bekerja sama setelah disepakatinya akad, lalu pihak petani penggarap memiliki wewenang untuk mengelola lahan pertanian yang dipercayakan oleh pemilik tanah kepadanya untuk digarap. Hal inilah yang mendasari akad kerja sama di dalam masyarakat kelurahan Palingkau Lama terlihat tidak terlalu berbeda dengan konsep *mukhabarah* di dalam Islam.

Pengetahuan masyarakat terhadap akad *mukhabarah* dalam Islam sendiri masih minim. Di kalangan masyarakat kelurahan Palingkau Lama, istilah *mukhabarah* masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih mengenal istilah dalam bahasa sehari-hari sehingga membutuhkan penjelasan agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad *mukhabarah* ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerja sama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda, masyarakat sering menyebutnya dengan bagi hasil atau mengarun sawah (menyewa lahan pertanian).

Menurut Eneng Hidayat, secara akal, *mukhabarah* termasuk akad *syirkah* (sewa-menyewa) terhadap harta salah satu dari orang yang berserikat.⁹⁶ Abdul Rahman Ghazaly juga menjelaskan bahwa akad *mukhabarah* mengandung makna akad *Al-Ijarah* (sewa-menyewa atau upah mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen.⁹⁷

⁹⁶ Eneng Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, ..., Hal. 173.

⁹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, ..., Hal. 117.

2. Praktik *mukhabarah* pada pertanian padi di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas

Praktik *mukhabarah* atau bagi hasil pada pertanian padi di kelurahan Palingkau Lama dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat, karena tidak semua petani mempunyai lahan untuk bisa digarap, tetapi memiliki kemampuan untuk bertani dan ada juga yang memiliki tanah tetapi tidak memiliki kemampuan dan waktu untuk mengelola lahan pertaniannya sendiri. Akad berawal dari penawaran salah satu pihak, baik pihak pemilik tanah maupun petani penggarap.

Sebagaimana Ibu R sebagai salah satu pemilik tanah menjelaskan bahwa pada awalnya petani penggarap yang ingin menggarap tanah beliau dan beliau bersedia menyerahkan tanahnya tersebut untuk dikelola, daripada tanah itu tidak digunakan, lebih baik diserahkan kepada petani penggarap kata beliau.

Selain petani penggarap yang menawarkan diri untuk menggarap lahan pertanian milik pemilik tanah, ada juga pemilik tanah yang meminta petani penggarap untuk menggarap lahan miliknya dikarenakan ada pekerjaan lain. Dan petani penggarap menyetujuinya dikarenakan petani penggarap hanya memiliki lahan yang sedikit.

Sebagaimana Bapak AK sebagai salah satu petani penggarap yang menjelaskan bahwa awal mulanya pemilik tanah yang menawarkan atau meminta beliau untuk menggarap lahannya tersebut dan beliau bersedia untuk menggarapnya.

Perjanjian adalah kesepakatan yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁹⁸

Berdasarkan pengamatan peneliti, perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Palingkau Lama rata-rata secara lisan dan tidak ada perjanjian tulis tangan atau hitam di atas putih. Jika pemilik tanah dan petani penggarap sudah mengucap ijab dan qabul dan sama-sama sepakat, maka perjanjian itu sudah di anggap berjalan.

Hal ini sesuai dengan rukun *mukhabarah* yang dijelaskan pada Bab II yaitu menurut jumhur ulama yang membolehkan akad *mukhabarah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah yaitu salah satunya ijab dan qabul. Contoh ijab dan qabul: “Saya serahkan tanah pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan hasilnya nanti kita bagi berdua”. Petani penggarap menjawab: “Saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua”. Jika hal ini telah terlaksana, maka hal ini telah sah dan mengikat. Namun, ulama Hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (kabul) akad *mukhabarah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.⁹⁹

⁹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan XIII, ..., Hal. 1.*

⁹⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat, ..., Hal.*

Sebagaimana yang dicontohkan oleh Bapak A selaku petani penggarap yang mengatakan bahwa beliau mendatangi pemilik tanah dan bertanya “apakah tanah tersebut tidak ada yang mengelolanya, jika tidak ada maka saya yang akan mengelolanya, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan”. Lalu pemilik tanah menjawab “baiklah daripada tidak ada yang menggarap tanahnya, jadi ku serahkan kepadamu”.

Di jelaskan dalam QS. Al-Maidah (5) : 1 mengenai perintah Allah SWT. bahwa seseorang itu harus memenuhi akad yang dilakukannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .¹⁰⁰

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”¹⁰¹

Dalam QS. Al-Isra’ (17) : 34, Allah SWT. telah menegaskan mengenai keharusan seseorang dalam memenuhi janjinya, yaitu:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا .¹⁰²

Artinya: “*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya*”¹⁰³

Berdasarkan ayat di atas, dapat kita lihat bahwa Allah SWT. telah mengatakan dengan jelas bahwa kita diperintahkan untuk memenuhi akad atau perjanjian yang kita lakukan, karena Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban atas semua janji tersebut.

¹⁰⁰ QS. Al-Maidah [5] : 1.

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*, ..., Hal. 109.

¹⁰² QS. Al-Isra' [17] : 34.

¹⁰³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*, ..., Hal. 285.

Setelah melakukan akad maka kewajiban pemilik tanah adalah menyerahkan lahannya sedangkan hak petani penggarap adalah menerimanya. Pemilik tanah menunggu hasil panen sawahnya, sedangkan kewajiban petani penggarap adalah mengelola lahan tersebut. Kemudian ketika sudah panen maka kedua belah pihak berhak menerima hasil panen dari sawah tersebut sesuai akad yang dilakukan di awal perjanjian.

Terkait dengan jangka waktu perjanjian akad *mukhabarah* yang dilakukan di kelurahan Palingkau Lama sebagian besar masih kurang jelas kapan berakhirnya akad *mukhabarah* tersebut, kecuali perjanjian antara Bapak J dan Ibu R yang mempunyai jangka waktu berakhirnya akad yaitu selama 3 tahun.

Sebagaimana Bapak J selaku petani penggarap menjelaskan bahwa jangka waktu perjanjian selama 3 tahun, sebelum 3 tahun tanah tersebut tidak boleh diambil oleh pemilik tanahnya dan jika lewat dari 3 tahun maka tanah tersebut bisa diambil atau perjanjian penggarapan sawahnya bisa diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

Karena jangka waktu penggarapan dalam perjanjian atau akad tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja. Artinya apabila dari pemilik tanah menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil kembali tanahnya maka itu bisa dilakukan, meskipun petani penggarap masih menginginkan sawah tersebut untuk digarap, dan sebaliknya apabila dari pihak petani penggarap

ingin mengakhiri akad atau ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap karena sudah tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaannya atau dalam penggarapannya mengalami kesulitan seperti masalah perairan, maka hal itu tetap bisa dilakukan. Karena asas yang digunakan adalah rela sama rela atau saling ridho dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal mengambil kembali tanah tersebut, pemilik tanah tetap harus memperhatikan kondisi tanaman yang mungkin masih belum siap panen, maka pemilik tanah harus menunggu sampai tanaman tersebut siap untuk dipanen. Sebaliknya petani penggarap jika ingin menyerahkan kembali tanah yang digarap, maka tetap harus memperhatikan kondisi tanamannya.

Berdasarkan hasil wawancara, bentuk akad yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Palingkau Lama yaitu tanah atau lahan pertanian berasal dari pemilik tanah, sedangkan untuk semua biaya dari bibit, pupuk, pengairan dan pembersihan lahan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengelolaan lahan adalah ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan lahan pertaniannya saja. Dalam penentuan jenis bibit tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, akan tetapi ditentukan oleh petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya mengikuti petani penggarap saja.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak K selaku pemilik tanah yang menyatakan bahwa pembersihan lahan ditanggung oleh petani penggarap dan biaya serta tenaga selama menggarap juga ditanggung oleh petani penggarap, beliau hanya menyediakan tanahnya saja untuk digarap.

Penentuan jenis bibit pun diserahkan kepada si petani penggarap dan ketika panen juga dilakukan oleh petani penggarap.

Pernyataan Bapak K sama halnya dengan pernyataan para pemilik tanah dan petani penggarap lainnya seperti Bapak S, Ibu R, Bapak K, Bapak AR, Bapak A, Bapak J, Bapak R dan Bapak F yang menyatakan bahwa penggarapan tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan tanahnya saja.

Hal ini sesuai dengan syarat *mukhabarah* yang menyangkut tanah pertanian yang dijelaskan pada Bab II yaitu tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad *mukhabarah* tidak sah.¹⁰⁴

Berbeda halnya dengan pernyataan Bapak AK yang menyatakan bahwa pembersihan lahan sudah ditanggung oleh pemilik tanah, karena tanah tersebut sudah pernah digarap sebelumnya oleh pemilik tanah yang kemudian penggarapan lahannya dilanjutkan oleh petani penggarap. Tetapi biaya lainnya seperti bibit, pupuk, pengairan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengelolaan lahan ditanggung oleh petani penggarap.

Terkait dengan pembagian hasil panen, kebanyakan para pelaku akad menggunakan cara yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat atau pembagiannya sesuai dengan kesepakatan pemilik tanah dengan petani penggarap saja yaitu dalam 1 borongan, pemilik tanah

¹⁰⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, ..., Hal.

mendapatkan bagian 1 blek dan biasanya petani penggarap mendapat 4-6 blek dalam 1 borongan tergantung subur atau tidaknya tanah tersebut.

Sebagaimana Bapak J sebagai salah satu petani penggarap yang menjelaskan bahwa pembagian hasilnya yaitu 1 blek dalam 1 borongan untuk pemilik tanah. Beliau menerangkan jika dalam 1 hektar terdapat 35 borongan, maka pemilik tanah mendapatkan 35 blek dalam 1 hektar jika hasilnya bagus. Dalam 1 borongan biasanya mendapat 5 blek jika tanahnya subur, tergantung tanahnya bagus atau tidak. Beliau menjelaskan bahwa tanah yang beliau garap kurang subur, paling banyak hasilnya dalam 1 borongan yaitu 5 blek, jadi 1 blek untuk pemilik tanahnya dan sisanya untuk petani penggarap.

Pembagian hasil yang dilakukan oleh Bapak J tersebut juga diterapkan oleh petani yang lain seperti Bapak A, Bapak R dan Bapak F yang menyatakan bahwa pembagian hasilnya dalam 1 borongan pemilik tanah mendapatkan 1 blek jika hasilnya bagus, sekitar 4 blek ke atas, dan petani penggarap mendapatkan sisanya. Hal tersebut sudah adil dalam syariah Islam, karena sudah disepakati kedua pelaku akad dan juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Berbeda dengan pembagian hasil panen yang dilakukan oleh Bapak H.I dengan Bapak AK yang pembagiannya yaitu sepertiga, $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap dan semua itu sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Bapak H.I sebagai pemilik tanah

dan Bapak AK sebagai petani penggarap, dan keduanya saling menyetujuinya.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak H.I selaku pemilik tanah yang menjelaskan bahwa pembagian hasilnya yaitu dibagi sepertiga, $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap, misalnya dapat 150 blek, jadi 50 blek untuk pemilik tanah dan 100 blek untuk petani penggarap.

Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak AK selaku petani penggarap yang menjelaskan bahwa pembagian hasilnya yaitu $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap. Jika hasil yang didapat banyak, maka banyak pula bagian untuk pemilik tanah dan jika hasilnya sedikit, maka sedikit pula bagian untuk pemilik tanahnya. Tetapi pembagiannya tetap dibagi sepertiga sesuai dengan penghasilan yang didapat.

Pembagian hasil panen di atas telah disepakati kedua pelaku akad dan keduanya saling suka, maka hal itu sudah sesuai dengan syariat Islam yang mana sayyid sabiq mengatakan, bagi hasil adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) tersebut, yang dimaksudkan di sini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang dihasilkan seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani penggarap dan pemilik tanah).¹⁰⁵

¹⁰⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ..., Hal. 159.

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan dari masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Jika dikaitkan dengan teori keadilan dalam Islam, manusia dituntut untuk saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, penuh kasih sayang, saling tolong menolong dan memiliki tenggang rasa, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Tuntutan yang mendasar bagi manusia dalam masalah kemasyarakatan adalah mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan tuntutan pribadi dan tuntutan kepentingan masyarakatnya atau kepentingan dan kebutuhan bersama. Apabila seseorang membiarkan orang lain dalam kesusahan dan tidak mengacuhkan kepentingan masyarakat, tetapi hanya mementingkan diri sendiri maka sikap atau tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kezaliman.¹⁰⁶

Menurut Sayyid Quthb, bentuk keadilan sudah selayaknya harus ditegakkan menurut ajaran Islam dalam berbagai aspek termasuk keadilan dalam bagi hasil bidang pertanian agar terdapat keseimbangan baik ditinjau dari segi perasaan para pihak dan juga pandangan seseorang.¹⁰⁷

Jika dalam penggarapan terjadi masalah atau terjadi kerusakan dengan hasilnya (gagal panen), maka pembagian hasilnya bisa berubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal itu dilakukan agar kedua belah

¹⁰⁶ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, ..., Hal. 35-36.

¹⁰⁷ *Ibid.*, Hal 26.

pihak tidak merasa dirugikan dan sama-sama merasa adil dengan hal tersebut.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak K selaku pemilik tanah yang menjelaskan jika pendapatannya sedikit atau terjadi gagal panen, maka pembagian hasilnya bisa diatur ulang kembali sesuai dengan kesepakatan bersama, agar keduanya sama-sama merasa adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Pernyataan Bapak K tersebut didukung pula oleh Bapak S, Bapak AR, Ibu R, Bapak A, Bapak J, Bapak R dan Bapak F yang menjelaskan bahwa perjanjiannya bisa berubah jika hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad dan pembagiannya bisa dibicarakan lagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik tanah dan petani panggarap, hal tersebut sudah dianggap adil dan sama-sama ikhlas karena sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak ditentukan salah satu pihak saja.

Berbeda halnya dengan perjanjian yang dilakukan oleh bapak H.I dan Bapak AK, jika hasil panen yang didapat sedikit atau terjadi gagal panen maka pembagian hasilnya tetap seperti perjanjian awal yaitu dibagi sepertiga, $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak H.I selaku pemilik tanah yang menjelaskan jika seandainya hasil yang didapat sedikit, tetap dibagi sepertiga yaitu $\frac{1}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{2}{3}$ untuk petani penggarap, sesuai dengan hasil yang didapatkan.

Para petani penggarap dan pemilik tanah tidak ada yang merasa keberatan jika perjanjiannya berubah ketika terjadi gagal panen karena kesepakatan yang mereka lakukan didasari dengan adanya keridhaan masing-masing, tidak memberatkan satu sama lain dan tidak ada yang merasa terzalimi karena pembagiannya ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Sebagaimana wawancara dengan Bapak J selaku petani penggarap yang menjelaskan bahwa masalah adil atau tidaknya pembagian hasil tersebut, disitulah nanti adanya timbang rasa antara kedua belah pihak, yang artinya kesepakatan bisa dibicarakan kembali sesuai hasil yang didapat nantinya. Jadi hal ini bisa dikatakan adil dan sama-sama ikhlas menurut beliau karena sudah disepakati kedua belah pihak.

Pendapat Bapak J didukung pula oleh Bapak S, Ibu R, Bapak K, Bapak AR, Bapak A, Bapak R dan Bapak F yang menjelaskan bahwa agar kedua belah pihak merasa adil dan tidak ada yang dirugikan atau terzalimi, maka perjanjian bisa berubah jika hasilnya tidak sesuai dengan perkiraan awal atau terjadi gagal panen. Dan kedua belah pihak juga melakukannya dengan ikhlas, tidak memberatkan satu sama lain karena pembagiannya ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Jika dikaitkan dengan kajian teori ikhlas, ikhlas dikaitkan dengan niat yang baik dalam menolong sesama. Ikhlas muncul apabila pelaku ingin melakukannya, pelaku berpikir bahwa hal ini baik untuk dilakukan. Dan perbuatan dilakukan tidak untuk alasan yang lain. Dalam kajian teori

ikhlas digambarkan di dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT. antara lain Surah Al-An'am Ayat 162:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.¹⁰⁸

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”¹⁰⁹

Menurut ajaran Islam, hidup ini adalah untuk beribadah, bekerja dan berbuat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Pada hakikatnya semua kebaikan itu, kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja sepatutnya hanya dipersembahkan kepada Allah semata, bukan kepada selain-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah At-Taubah ayat 5 antara lain:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ.¹¹⁰

Artinya: “Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.¹¹¹

¹⁰⁸ QS. Al-An'am [6] : 162.

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*, ..., Hal. 76.

¹¹⁰ QS. At-Taubah [9] : 5.

¹¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*, ..., Hal. 103.

Beberapa ayat di atas menegaskan bahwa beribadah ataupun bekerja dengan ikhlas adalah satu-satunya tugas dan kewajiban manusia kepada Allah SWT. dan seluruh aktivitas hidup dan kewajiban manusia adalah dalam rangka pengabdian ibadah serta perilaku ketauhidan yang jauh dari syirik serta jauh dari kesesatan.¹¹²

3. Tinjauan Ekonomi Islam dalam Penerapan Bagi Hasil Yang Dilakukan Sehari-Hari dengan Sistem *Mukhabarah* Di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas

Allah SWT. memerintahkan manusia bekerja dengan bersungguh-sungguh dan melalui jalan halal dalam mencari nafkah, yang mana hal tersebut akan menunjukkan eksistensi manusia sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhannya serta dapat menunaikan fungsinya sebagai khalifah sekaligus hamba Allah SWT. yang senantiasa mengabdikan kepadanya. Dan pada sisi yang lain manusia sebagai makhluk sosial yang sudah pasti pula tidak akan mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Di sinilah pentingnya hidup tolong menolong, ketergantungan manusia dengan manusia yang lain itu diperlukan.¹¹³

Agar kehidupan manusia itu berjalan lancar, tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup bermasyarakat, ada aturan-aturan yang mengatur masalah harta dan hubungan antara sesama manusia yaitu satu bagian

¹¹² M. Amin Syukur, *Tasawuf Kontekstual*, ..., Hal. 120.

¹¹³ Muhammad M Said dan Ali Murtadho Emzaed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Hal. 101.

dalam fiqih yang disebut bab muamalat. Salah satu bentuk yang diatur dalam Islam adalah *mukhabarah*.

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah/ tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarap tanah.¹¹⁴

Manusia dianjurkan untuk menggunakan kemampuan ataupun potensi yang ada di dalam dirinya, akan tetapi tidak bisa terlepas dari sumber daya alam yang tersedia di mana tempat ia tinggal. Dengan demikian, masyarakat kelurahan Palingkau Lama telah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi serta sumber daya alam yang tersedia yaitu pertanian, terutama pertanian padi. Dalam hal ini, masyarakat kelurahan Palingkau Lama bekerja menjadi petani sebagai sumber perekonomian mereka.

Walaupun sebenarnya tidak semua masyarakat kelurahan Palingkau Lama yang mempunyai lahan untuk digarap, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menggarapnya dan ada pula yang mempunyai lahan, akan tetapi tidak mempunyai kemampuan dan bahkan tidak mempunyai waktu untuk menggarapnya. Untuk menghindari agar jangan terjadinya ketelantaran lahan, maka mereka melakukan akad kerja sama untuk memanfaatkan lahan pertaniannya tersebut.

¹¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, ..., Hal. 117.

Hal yang melatar belakangi kerjasama selain yang di atas, juga dipengarungi oleh faktor ekonomi. Pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap lahannya, maka pemilik tanah mendatangi petani penggarap untuk menyerahkan tanahnya agar digarap oleh petani penggarap, sehingga lahan tersebut menjadi aset tabungan bagi pemilik tanah. Sedangkan bagi petani penggarap memang kebutuhan ekonomi yang kurang, maka petani penggarap mendatangi pemilik tanah agar tanahnya bisa digarap, maka terjadilah kerja sama *mukhabarah* tersebut.

Di lihat dari perspektif ekonomi Islam, penerapan akad *mukhabarah* yang terjadi di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas, di mana ekonomi Islam merupakan bagian dari suatu tata kehidupan lengkap yang berdasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sehingga dalam ekonomi Islam harus berbasis minimal kepada ke empat tersebut, agar hukum yang diambil sesuai dengan prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam.

Jadi bisa dikatakan bahwa semua aktifitas manusia di muka bumi ini harus berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam, yaitu seperti prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Masudul Alam Choudoury yaitu: (1) prinsip tauhid dan persaudaraan,

(2) prinsip kerja dan produktivitas, dan (3) prinsip distribusi kekayaan yang merata dan adil.¹¹⁵

a. Prinsip Tauhid dan Persaudaraan

Tauhid adalah konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslim akan sangat terjaga karena mereka merasa bahwa Allah SWT. akan selalu melihat apa yang dilakukannya. Sedangkan konsep persaudaraan atau yang biasa disebut dengan *ukhuwah Islamiyah* memberikan makna persaudaraan dan kerja sama yang tulus antar sesama muslim dalam aktivitas ekonomi.¹¹⁶

Menurut peneliti, penerapan akad *mukhabarah* di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas sendiri sudah sesuai dengan prinsip tauhid dan persaudaraan. Hal ini dibuktikan dari cara pemilik tanah dan petani penggarap bertransaksi dan saling mempercayai satu sama lain dalam berakad. Dengan adanya akad *mukhabarah* ini, maka persaudaraan antara pemilik tanah dengan petani penggarap akan menghasilkan hubungan yang harmonis, yang dahulu tidak kenal dan menjadi saling mengenal satu sama lain.

b. Prinsip Kerja dan Produktivitas

Ekonomi Islam mengajarkan individu untuk bekerja semaksimal mungkin dengan tingkat produktivitas kerja yang tinggi

¹¹⁵ H. M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonsia*, Jakarta: eLSAS, 2006, Hal. 149.

¹¹⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, Hal. 5.

dengan tujuan untuk memberikan yang terbaik bagi kemaslahatan umat.¹¹⁷

Dalam pelaksanaan akad *mukhabarah* ini, penggarap dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga, yaitu hasil panen yang layak dan bisa menguntungkan pihak pemilik tanah maupun petani penggarap.

c. Prinsip Distribusi Kekayaan Yang Merata dan Adil

Proses redistribusi kekayaan yang adil ini bertujuan untuk pemeratakan kekayaan antara pihak yang kaya dan juga pihak yang miskin. Terdapat larangan yang berkaitan dengan harta benda, yaitu larangan mengkonstrasikan peredaran harta benda pada segelintir orang saja. Distribusi kekayaan harus berjalan berimbang dan merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Rata-rata orang yang mempunyai lahan sendiri yang diserahkan kepada penggarap adalah dari kalangan orang yang berkecukupan, sedangkan mayoritas petani penggarap yang ada di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas berasal dari golongan menengah ke bawah yang memang menggantungkan kehidupannya pada pertanian dan salah satunya dengan perjanjian bagi hasil ini.¹¹⁸

¹¹⁷ *Ibid.*, Hal. 6.

¹¹⁸ H. M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonsia*, ... Hal. 146.

Selain dari ketiga prinsip di atas, dalam ilmu ekonomi Islam dikenal dengan asas-asas dalam ekonomi Islam, yaitu:

a. Asas Suka Sama Suka (Asas Sukarela)

Asas ini bukan sukarela yang sifatnya semu atau sementara, kerelaan itu harus dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk muamalah yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaan akad *mukhabarah* di kelurahan Palingkau Lama ini pemilik tanah dengan sukarela menyerahkan lahannya untuk digarap oleh petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil pada waktu hasil panen tiba. Dan penggarap pun dengan sukarela menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan. Artinya antara kedua belah pihak baik pemilik tanah maupun petani penggarap tidak ada keterpaksaan untuk melakukan akad tersebut.

b. Asas Saling Menguntungkan dan Tidak Ada Pihak Yang Dirugikan

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa petani penggarap dan pemilik tanah di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas yang berpendapat bahwa dalam bagi hasil yang terjadi sudah sesuai dengan kesepakatan bersama di awal akad dan saling menguntungkan antara keduanya. Serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena pada dasarnya semua modal yang dikeluarkan untuk pengelolaan lahan pertanian tersebut dari pihak petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan lahannya saja, jadi wajar saja jika petani penggarap

mendapatkan bagian dari hasil panen yang lebih besar daripada pemilik tanah.

c. Asas Saling Tolong Menolong

Asas saling tolong menolong berarti terjadi kesukarelaan antara dua belah pihak yang saling membantu. Dalam akad *mukhabarah* di kelurahan Palingkau Lama bisa dikatakan sudah mengandung asas tolong menolong, karena pemilik tanah sudah membantu para petani penggarap untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan petani penggarap juga telah membantu pemilik tanah untuk mengolah lahannya yang rata-rata pemilik tanah ini tidak sempat atau tidak memiliki waktu luang untuk mengolah lahannya sendiri.

Dalam ajaran Islam digambarkan bahwa tanah sebagai suatu faktor produksi yang penting untuk dikelola manusia, dimana Allah telah menurunkan hujan untuk membasahi tanah yang tandus sehingga dapat ditanami oleh manusia. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Sajdah Ayat 27:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ
أَنْعَامُهُمْ وَانْفُسُهُمْ.¹¹⁹

Artinya: “Dan apakah mereka tidak melihat bahwa Kami menghalau air ke bumi yang tandus, lalu Kami keluarkan dengannya tanam-

¹¹⁹ QS. Al-Sajdah [32] : 27.

*tanaman yang darinya makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri.”*¹²⁰

Dari ayat di atas menurut Quraish Shihab ayat yang lalu mengecam kaum musyrikin yang tidak mendengar dan menarik pelajaran dari perjalanan mereka melalui pemukiman dan peninggalan generasi terdahulu, kini melalui ayat di atas kecaman dilanjutkan dengan menyatakan: Apakah mereka mengingkari keniscayaan Kiamat dengan berdalih kalau mereka terkubur tidak mungkin akan hidup lagi, *dan apakah mereka tidak melihat dan memerhatikan bahwa Kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus*, baik karena ulah manusia maupun karena terjadinya kemarau panjang, *lalu Kami keluarkan dari kedalaman tanah, yakni tumbuhan, dengannya, yakni dengan air hujan itu, tanam-tanaman serta rerumputan yang darinya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri pun dapat makan.*¹²¹

Berdasarkan ayat Al-Qur'an surah Al-Sajdah ayat 27 dan penafsiran oleh M. Quraish Shihab di atas jika dihubungkan dengan praktik terjadinya *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap di kelurahan Palingkau Lama, bahwa ada kesesuaian dengan maksud penafsiran ayat tersebut yakni para petani di kelurahan Palingkau Lama sebagai insan manusia dikaruniai berbagai macam sumber daya alam dan diberi akal untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan keahliannya untuk memberdayakan sumber daya alam yang bermanfaat

¹²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*, ..., Hal. 210.

¹²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 10*, ..., Hal. 397.

untuk keperluan manusia. Selain Dia menciptakan tanah dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atasnya, Allah juga memberikan keleluasaan kepada manusia untuk mengelola bumi dengan penuh bijaksana untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia itu sendiri.

Bentuk akad *mukhabarah* yang terjadi di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas yaitu tanah atau lahan pertanian berasal dari pemilik tanah, sedangkan untuk semua biaya dari bibit, pupuk, pengairan dan pembersihan lahan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengelolaan lahan adalah ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan lahan pertaniannya saja. Dalam penentuan jenis bibit tidak ada kesepakatan dari kedua belah pihak, akan tetapi ditentukan oleh petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya mengikuti petani penggarap saja.

Jika dihubungkan dengan kajian teori keadilan dalam Islam, dinyatakan bahwa bentuk keadilan sudah selayaknya harus ditegakkan menurut ajaran Islam dalam berbagai aspek termasuk keadilan dalam bagi hasil bidang pertanian agar terdapat keseimbangan baik ditinjau dari segi perasaan para pihak dan juga pandangan seseorang.¹²² Dalam konsep Islam juga telah dijelaskan bahwa aspek keadilan dalam bagi hasil pertanian haruslah ada keridhaan antara kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing-masing, kesepakatan harus dijelaskan di awal akad, dan pembagian hasil panen juga harus dijelaskan di awal akad.

¹²² Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, ..., Hal. 27.

Jika dihubungkan dengan praktik terjadinya *mukhabarah* di kelurahan Palingkau Lama, kebanyakan para pelaku akad menggunakan cara yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat atau pembagiannya sesuai dengan kesepakatan pemilik tanah dengan petani penggarap saja yaitu dalam 1 borongan, pemilik tanah mendapatkan bagian 1 blek dan biasanya petani penggarap mendapat 4-6 blek dalam 1 borongan tergantung subur atau tidaknya tanah tersebut, dan pemilik tanah tetap mendapatkan 1 blek dalam 1 borongan. Di lihat dari kasat mata, praktik kerja sama tersebut ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu pemilik tanah, di mana dalam pembagian hasil panen, pemilik tanah tetap mendapatkan 1 blek dalam 1 borongan walaupun hasil panennya lebih banyak dari biasanya ataupun lebih sedikit. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidak demikian, di antara kedua belah pihak yang berakad ternyata tidak ada yang merasa dirugikan karena semua modal yang dikeluarkan untuk pengelolaan lahan tersebut dari pihak petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan lahannya saja. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan, bahwa aspek keadilan yang terjadi pada praktik bagi hasil di kelurahan Palingkau Lama ini tidak terlalu nampak. Karena antara kedua belah pihak sudah saling ridho, saling mengerti dan saling tenggang rasa.

Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian (proporsional), bukan lawan kata dari kezaliman. Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar

seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang membedakan satu dengan yang lain, seperti perbedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian. Apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan.¹²³

Dalam kehidupan ekonomi, keadilan memiliki pengaruh yang lebih luas, apabila ada kecurangan dalam bidang ekonomi dan keuangan akan berdampak serius pada kehidupan sosial pada suatu masyarakat. Disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 85:

فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ¹²⁴

Artinya “Penuhilah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu mengurangi jatah orang lain”.¹²⁵

Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa berbuat kecurangan dalam bidang ekonomi dianggap sebagai perbuatan yang dzolim dan merusak karena perilaku sebagian manusia yang tamak.

Hal ini jika dihubungkan dengan sistem *mukhabarah* yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Palingkau Lama dalam hal pembagian hasil, jika dalam penggarapan terjadi masalah atau terjadi kerusakan dengan hasilnya (gagal panen), maka pembagian hasilnya bisa berubah sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal itu dilakukan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan dan sama-sama merasa adil dengan hal

¹²³ Muhammad M Said dan Ali Murtadho Emzaed, ..., Hal. 94.

¹²⁴ QS. Al-A'raf [8] : 85.

¹²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*, ..., Hal. 82.

tersebut. Para petani penggarap dan pemilik tanah tidak ada yang merasa keberatan jika perjanjiannya berubah ketika terjadi gagal panen karena kesepakatan yang mereka lakukan didasari dengan adanya keridhaan masing-masing, tidak memberatkan satu sama lain dan keduanya pun merasa ikhlas, tidak ada yang merasa terzalimi karena pembagiannya ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Jika dihubungkan dengan kajian teori Ikhlas, untuk memperoleh sifat ikhlas diperlukan beberapa sifat atau sikap sebagai penunjang kesempurnaan yang harus ada dalam sifat ikhlas dan sekaligus sebagai *quality control* bagi keikhlasan itu sendiri, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Tawakal

Tawakal ialah menyerahkan, menyandarkan diri kepada Allah setelah melakukan usaha atau ikhtiar dan mengharapkan pertolongan-Nya. Tawakal dalam ajaran Islam bukan suatu pelarian bagi orang-orang yang gagal usahanya, tetapi tawakal itu adalah tempat kembalinya segala usaha. Tawakal bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha, tetapi menyerahkan diri pada Allah itu pertanda taat kepada-Nya setelah berusaha. Jika pasrah itu merupakan sifat malas dan putus asa, jelas dilarang oleh Allah.¹²⁶

¹²⁶ M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2007, Hal. 53.

Dalam pelaksanaan akad *mukhabarah* ini pemilik tanah menyerahkan tanahnya sepenuhnya kepada petani penggarap dan petani penggarap menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan, kemudian pemilik tanah hanya menunggu hasilnya saja. Artinya, pemilik tanah mempercayai petani penggarap untuk menggarap tanahnya dan tidak terlalu menuntut dengan hasilnya karena adanya sikap tawakal yang berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil suatu pekerjaan.

b. Syukur

Kata *al-syukur* (الشكر) berasal dari bahasa Arab yang bermakna “terima kasih” dalam bahasa Indonesia. Syukur secara linguistik bermakna “pujian atas kebaikan yang telah diberikan”. Sedangkan syukur secara terminologi ialah pantulan nikmat Tuhan yang diberikan kepada seseorang, sehingga iman berbekas dalam hati disertai dengan ucapan pujian, sanjungan serta berbekas di anggota badan seseorang untuk berbuat ibadah dan ketaatan.¹²⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa syukur menurut istilah adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah SWT. atas nikmat yang diberikan kepadanya. Pemilik tanah dan petani penggarap sangat bersyukur dengan adanya *mukhabarah* ini dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi petani yang tidak memiliki

¹²⁷ H. Nasharuddin, *Akhlak (Ciri Manusia Paripurna)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hal. 408-409.

sawah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan juga menjadi tabungan tersendiri bagi pemilik tanah karena tinggal menunggu hasil panennya.

c. Sabar

Sabar (صبر) merupakan bentuk pengendalian diri atau kemampuan menghadapi rintangan, kesulitan menerima musibah dengan ikhlas dan dapat menahan marah, titik berat nurani (hati). Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, dengan kesabaran itulah seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan.¹²⁸

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan petani penggarap di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas dalam praktik *mukhabarah* ini, jika terjadi gagal panen atau hasilnya tidak banyak, pemilik tanah dan petani penggarap menerimanya dengan berlapang dada dan menghadapinya dengan sabar. Petani penggarap dengan ikhlas tetap memberikan hasil panen kepada pemilik tanah walaupun seadanya karena terjadi gagal panen dan pemilik tanah pun menerima hasilnya dengan ikhlas walaupun tidak banyak, karena keduanya tidak ingin memberatkan satu sama lain.

¹²⁸ Ibnu Qayyim Al-Zaujiyyah, *Al-Fawa'id*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998, Hal. 95.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Penerapan Sistem Mukhabarah dalam Kegiatan Pertanian Di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya kerja sama *mukhabarah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas yaitu tidak semua petani di kelurahan Palingkau Lama memiliki lahan pertanian sendiri untuk digarap, tetapi memiliki kemampuan untuk bertani sehingga mereka menggarap lahan milik orang lain, dan ada juga pemilik tanah yang tidak memiliki kemampuan dalam bertani dan tidak ada waktu dikarenakan adanya pekerjaan lain sehingga mereka tidak mampu untuk mengelola lahannya sendiri, kondisi ini yang mendorong pemilik tanah dan petani penggarap melakukan kerja sama dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan petani penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari petani penggarap.
2. Praktik *mukhabarah* atau bagi hasil pada pertanian padi di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yaitu setelah melakukan akad maka kewajiban pemilik tanah adalah

menyerahkan lahannya sedangkan hak petani penggarap adalah menerimanya. Pemilik tanah menunggu hasil panen sawahnya, sedangkan kewajiban petani penggarap adalah mengelola lahan tersebut. Kemudian ketika sudah panen maka kedua belah pihak berhak menerima hasil panen dari sawah tersebut sesuai akad yang dilakukan di awal perjanjian. Sedangkan bentuk akad yang dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Palingkau Lama yaitu tanah atau lahan pertanian berasal dari pemilik tanah, sedangkan untuk semua biaya dari bibit, pupuk, pengairan dan pembersihan lahan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengelolaan lahan adalah ditanggung oleh petani penggarap, sedangkan pemilik tanah hanya menyediakan lahan pertaniannya saja.

3. Tinjauan Ekonomi Islam dalam penerapan bagi hasil yang dilakukan sehari-hari dengan sistem *mukhabarah* di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yaitu penerapan sistem *mukhabarah* yang dilakukan masyarakat Kelurahan Palingkau Lama belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan aturan dalam Islam yang sudah ada, akan tetapi mereka memakai menurut kebiasaan masyarakat setempat yakni dengan tidak menentukan jangka waktu berlakunya akad *mukhabarah* dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan pemilik tanah dengan petani penggarap saja. Proses transaksi *mukhabarah* yang dilakukan di kelurahan Palingkau Lama kecamatan Kapuas Murung kabupaten Kapuas dapat dikategorikan kerja sama yang sah karena saling mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela dan

merupakan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits serta tidak mengandung mudharat. Dalam hal ini, aspek keadilan yang terjadi pada praktik bagi hasil di kelurahan Palingkau Lama ini tidak terlalu nampak. Karena antara kedua belah pihak sudah saling ridho, saling mengerti dan saling tenggang rasa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran-saran untuk dicermati dan ditindaklanjuti. Adapun yang peneliti sarankan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk kerja sama dengan sistem *mukhabarah* yang terjadi di Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung masih menggunakan adat kebiasaan setempat dengan saling mempercayai antara sesama anggota masyarakat dan biasanya dilakukan secara lisan oleh para pihak. Dalam hal ini, peneliti menyarankan agar dalam setiap melakukan suatu bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil sebaiknya dilakukan dalam bentuk tertulis. Hal ini penting agar dapat dijadikan bukti dan dari kedua belah pihak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.
2. Dalam melakukan kerja sama bagi hasil dengan sistem *mukhabarah* ini hendaknya menentukan berapa lama waktu yang akan diperjanjikan ketika di awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak.

3. Hendaknya memadukan antara adat kebiasaan dengan pemahaman agama, sehingga pelaksanaan kerja sama *mukhabarah* ini pelaksanaannya sesuai dari sisi adat kebiasaan maupun agama.
4. Pada saat panen berlimpah, maka petani penggarap bisa menambah hasil untuk pemilik tanah dan pada saat panen sedikit maka pemilik tanah tidak meminta lebih dari si petani penggarap.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, M. Yatimin, *Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2007
- Ahmadi, Rulam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Al-Asfahani, Al-Raghib, *Mu'jam Mufradat al-Fadz al-Qur'an*, Damaskus: Dar Al-Qalam, 2009.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifaayatul Akhyaar fii Alli Ghaayatil Ikhtishaar*, Surabaya: PT Bima Ilmu, 1997.
- Al-Jarjawi Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Angkasa, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jendral Sudirman, 2010.
- Bambang, R. Joni, *Hukum Ketatanegaraan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Damanhuri, *Akhlak Tasawuf*, Banda Aceh: Penerbit Pena, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Gazalba, Sidi, *Asas Agama Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- H. Nasharuddin, *Akhlak (Ciri Manusia Paripurna)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Halim, A. Ridwan, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hamid, H. M. Arfin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonsia*, Jakarta: eLSAS, 2006.
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999, Hal. 118.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an 20 Baris & Terjemahan 2 Muka*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2013.
- Khadduri, Majid, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- M Said, Muhammad dan Ali Murtadho Emzaed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Milles, Matthew & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Niat dan Ikhlas*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Qayyim, Al-Zaujiyyah Ibnu, *Al-Fawa'id*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Pemerintah Kabupaten Kapuas, *LAKIP Tahun 2009*, Kapuas: t.p, 2009
- Profil Kelurahan Palingkau Lama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas.
- Pokja Sanitasi Kabupaten Kapuas, *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kapuas Tahun 2014*, Kapuas: t.p, 2014
- Sentanu, Erbe, *Quantum Iklas Teknologi Aktivasi Kekuatan Hati*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 10*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan XIII*, Jakarta: Intermasa, 1991
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syukur, M. Amin, *Tasawuf Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

B. Internet

Agus, Erick Prasetyo, *Produktivitas Kerja Petani Ditinjau Dari Sistem Muzara'ah*, diakses pada <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/14508/>, pada tanggal 04-07-2018, pukul 20.43 WIB.

Irohah, Ainun Ro'fatul, *Praktik Akad mukhabarah Di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik (Kajian Tentang Realitas Hukum Islam)*, diakses pada <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/3441>, diunduh pada tanggal 26-07-2018, Pukul 10.55 WIB.

Faridah, Syarifah Nurul, *Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah*, diakses pada <https://repository.ar-raniry.ac.id/2302/1/SKRIPSI%2520SYARIFAH%2520NURUL%2520FARIDAH.pdf>, diunduh pada tanggal 06-07-2018, Pukul 21.56 WIB.

Sukron, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang*, diakses pada http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/780/1/M.Sukron_21411007.pdf, diunduh pada tanggal 06-07-2018, Pukul 20.27.

C. Aplikasi

Lidwa Pustssaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadits.